

**PRAKARSA WARGA DAN PEMERINTAH DESA DALAM  
MENGATASI KEMISKINAN**

(Studi *Governing* di Desa Tengkejau Kabupaten Melawi Kalimantan Barat)

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

TRI TONGA  
19520128

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2025**



**PRAKARSA WARGA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI  
KEMISKINAN**

**(Studi *Governing* di Desa Tengkejau Kabupaten Melawi Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Disusun Oleh:**

**TRI TONGA  
19520128**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

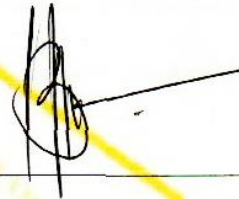
Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Februari 2025  
Jam : 11.30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.IP., M.Si  
Dosen Pembimbing



Utami Sulistiana, S.P., M.P  
Penguji Samping I



Drs, R. Yulianus Gatot, M.Si  
Penguji Samping II



Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tri Tonga  
NIM : 19520128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi *Governing* Di Desa Tengkejau Kabupaten Melawi Kalimantan Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

  
38PCEAMX188256795 Tri Tonga



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Tri Tonga  
NIM : 19520128  
Telp : 082128178413  
Email : [tongatri2@gmail.com](mailto:tongatri2@gmail.com)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Governing Di Desa Tengkejau Kabupaten Melawi Kalimantan Barat)”**.

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025



Tri Tonga  
19520128

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan penyertaanya serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PRAKARSA WARGA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan, serta saran yang berguna. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak bekerja sendiri. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses, belajar dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh Pendidikan di “APMD” Yogyakarta.
6. Bapak Syaifullah selaku Kepala Desa di Desa Tengkejau beserta Aparat Desa dan segenap Kelompok Tani di Desa Tengkejau yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta menjadi teman diskusi selama penulis melaksanakan penelitian.
7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, Selasa, 11 Februari 2025

**Penulis**



**Tri Tonga**

## **MOTTO**

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”.

(Yesaya 41:10)

“Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi”.

(1 Korintus 5:7)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, perlindungan, dan tuntunan-Nya selama ini, sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang-orang yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, dukungan, kekuatan, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, semangat, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, terutama:

1. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Bapak Matias Ata dan Ibu Layak, yang telah mendidik saya dengan baik dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas cinta, doa, dan kepercayaan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk saya, atas kerja keras dan usaha Bapak dan Ibu dalam memenuhi setiap kebutuhan saya. Terima kasih juga karena telah menjadi panutan terbaik bagi saya. Meskipun skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya, saya sangat bersyukur atas semua dukungan dan semangat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
2. Terima kasih juga saya ucapkan kepada saudari saya kakak Lisiana yang selama ini selalu memberi semangat dan menguatkan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Terima kasih saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si, terima kasih atas kesabaran dan kebaikan hati Bapak dalam membimbing dan mengajarkan saya. Tanpa bimbingan Bapak, saya tidak akan bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Tuhan yang membalas segala kebaikan dan kemurahan hati Bapak.
4. Terima kasih kepada teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Afner, Donartus, dan Amin yang telah bersedia menjawab pertanyaan saya saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat luar biasa, serta saran dan pertolongan yang kalian berikan dengan cara masing-masing, sehingga saya dapat menyelesaikan proses skripsi ini.

## INTISARI

Penelitian ini mengkaji tentang peran prakarsa warga dan pemerintah desa dalam upaya memberantas kemiskinan di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Menggunakan metode kualitatif eksplanatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pendekatan *governing* dapat memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi, pengelolaan dana desa, serta kebijakan pembangunan yang tepat memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Program seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan yang belum merata, serta efektivitas pengelolaan dana desa yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, masih ditemukan kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan hasil yang diharapkan belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis partisipasi aktif warga. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat diakses oleh seluruh lapisan warga. Selain itu, optimalisasi sumber daya lokal dapat menjadi strategi penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan strategi pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi sumber daya yang ada, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat antara warga dan pemerintah desa diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih mandiri, inovatif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pembangunan desa.

***Kata Kunci: Prakarsa, Partisipasi, Kemiskinan, Governing***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Akademis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	12
F. Literatur Riview .....	12
G. Kerangka Konseptual .....	15
1. Prakarsa Warga .....	15
2. Prakarsa Pemerintah Desa.....	17
3. Kemiskinan .....	20
4. <i>Governing</i> .....	23
H. Metode Penelitian.....	26
1. Lokasi Penelitian.....	27

2. Obyek Penelitian.....	27
3. Subyek Penelitian .....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEMISKINAN DI DESA TENGAJAU ....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah Desa Tengkejau .....	34
B. Keadaan Geografis Desa Tengkejau.....	35
C. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Tengkejau .....	37
1. Visi .....	37
2. Misi.....	37
D. Data Kemiskinan Desa Tengkejau.....	37
E. Kelembagaan Desa Tengkejau .....	39
F. Adat Istiadat .....	41
G. Kondisi Demografi .....	42
H. Mata Pencarian dan Ekonomi .....	44
I. Sarana dan Prasarana.....	46
1. Sarana dan Prasarana .....	46
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tengkejau .....	48
<b>BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Peran Kolaboratif antara Warga dan Pemerintah Desa dalam mengatasi kemiskinan .....	52
B. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Desa .....	59
C. Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya pada Pembangunan Fisik dan Sosial...69	
D. Evaluasi Pengaruh Prakarsa pemerintah dan warga terhadap penurunan tingkat kemiskinan .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data Informan .....	30
Tabel 2. 1 Data BNBA Keluarga Miskin .....	38
Tabel 2. 2 Mata Pencaharian .....	44
Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Desa Tengkejau .....	46



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tengkejau.....	49
--	----

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2. 1 Pendidikan Desa Tengkajau .....	42
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum desa membangun yaitu desa yang memiliki cita-cita atau tujuan, dalam upaya penyelesaian permasalahan desa secara mandiri. Salah satunya permasalahan kemiskinan yang saat ini masih menjadi titik fokus desa untuk diselesaikan. Menurut Suryawati, (2006) Kemiskinan diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Artinya permasalahan kemiskinan ini memang masih menjadi penghambat produktivitas masyarakat di desa. Maka perlu adanya upaya penanganan permasalahan tersebut melalui masyarakat dan pemerintah desa yang dituangkan dalam empat prinsip kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong dan memberikan pembinaan kepada masyarakat Desa untuk lebih agresif dalam membangun Desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan dan urusan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam konteks membangun, pemerintah Desa mendorong untuk mencapai kemandirian salah satunya adalah melalui kewenangan bagi inovasi

desa, prakarsa desa, seperti yang tercantum dalam pasal 4, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan mendorong prakarsa desa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Hal ini menumbuhkan harapan bahwa segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat dipenuhi dengan baik. Diharapkan supaya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberhasilan pelaksanaan proses pengembangan masyarakat tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik menyangkut kualifikasi pengembangan masyarakat sebagai pendamping pelaksana program, kondisi/karakteristik masyarakat serta yang paling penting adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan prakarsa, swadaya dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat turut serta berperan secara aktif di dalam proses pembangunan.

Berangkat dari itu, fenomena ini yang akan mengkaji tentang prakarsa warga dan pemerintah Desa. Prakarsa adalah suatu bentuk Inisiatif yang berasal dari dalam diri seseorang/kelompok orang, baik dalam bentuk upaya dan ikhtiar (tindakan) sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menghasilkan tata kelola daerah yang mandiri. Sehingga kajian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan bagi pengambil kebijakan untuk menggiatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat berdasarkan pada kearifan lokal dalam bentuk prakarsa masyarakat,

serta membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan prakarsa masyarakat merupakan berbagai bentuk prakarsa yang ada di masyarakat dimana dinamika masyarakat itu sendiri sangat diharapkan. Prakarsa masyarakat ini pun tidak hanya terbatas di bidang ekonomi, tetapi dapat juga dilakukan di banyak bidang, seperti politik, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan lain-lain.

Desa membangun merupakan desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa secara mandiri untuk meningkatkan kualitas indeks kehidupan masyarakat desa, dimana pembangunan desa banyak ditentukan oleh struktur pemerintahan serta masyarakat desa dengan melaksanakan empat prinsip kewenangan desa dengan melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Hal ini dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan seperti indeks kemiskinan desa, dengan menaikkan status desa dari desa tertinggal menuju desa mandiri. Menurut Marwan Jafar dalam Purwanti Eri., (2018) IDM bisa dijadikan rujukan untuk pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Penentuan SDM dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama proses kemajuan dan pemberdayaan desa. Orientasi pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat terkandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan berarti rakyat didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan sejak

perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan.

Meskipun Pulau Kalimantan memiliki persentase penduduk miskin terendah di Indonesia, sebesar 5,44% pada Maret 2024, beberapa desa seperti Tengkejau malah mengalami peningkatan tingkat kemiskinan. Fenomena ini dapat disebabkan oleh banyak variabel unik yang dapat mempengaruhi ekonomi lokal desa. Ketergantungan ekonomi yang besar pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perkebunan merupakan faktor utama. Desa-desanya di Kalimantan, termasuk Tengkejau, sebagian besar bergantung pada pendapatan mereka dari hasil pertanian atau komoditas sumber daya alam. Jika harga komoditas turun atau hasil panen tidak optimal, pendapatan masyarakat desa dapat menurun drastis. Misalnya, penurunan harga karet atau sawit, yang merupakan komoditas utama di banyak daerah Kalimantan, dapat secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah rumah tangga yang masuk ke dalam kategori miskin. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di desa-desa terpencil seperti Tengkejau mungkin merupakan penghalang utama untuk menurunkan angka kemiskinan. Desa-desa terpencil tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka karena infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses jalan yang buruk, terbatasnya pelayanan kesehatan, dan kurangnya fasilitas pendidikan. Akibatnya, desa-desa ini semakin terisolasi dan tidak dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah perkotaan. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan Kalimantan mencapai 4,27%, sementara di pedesaan seperti



Tengkajau lebih tinggi, yaitu 6,61%. Ada perbedaan yang jelas antara dua wilayah ini. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Ketidakmampuan desa untuk menurunkan tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh alokasi anggaran pembangunan. Program pengentasan kemiskinan di desa-desa seperti Tengkajau mungkin tidak efektif jika dana pembangunan pemerintah dialokasikan tidak tepat sasaran atau tidak memadai. Hal ini diperburuk oleh seringnya terjadi ketidakmerataan dalam distribusi bantuan sosial, yang mengakibatkan desa-desa terpencil tidak mendapatkan manfaat dari program-program tersebut seperti yang diharapkan. Sebagai perbandingan, Garis Kemiskinan Indonesia tercatat sebesar Rp.582.932 per kapita per bulan pada Maret 2024. Namun, banyak desa terpencil sulit mencapai angka ini karena tidak ada program pemberdayaan ekonomi yang tersedia. Oleh karena itu, desa-desa tertentu seperti Tengkajau terus mengalami kemiskinan, meskipun Kalimantan secara keseluruhan mencatat penurunan relatif rendah dalam tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kompleks dari faktor ekonomi lokal, infrastruktur yang kurang, kebijakan pembangunan yang tidak merata, dan ancaman bencana alam.

Desa sendiri dikatakan tempat yang didalamnya berisikan masyarakat dan pemerintah desa, yang bekerjasama meningkatkan indeks kehidupan bermasyarakat di desa. Purwanti Eri (2018:18), desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Disini peneliti sedang mengamati salah satu desa di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, yaitu Desa Tengkajau. Desa Tengkajau

merupakan desa yang berada di Kalimantan Barat Kabupaten Melawi. Desa Tengkejau memiliki empat Dusun dan memiliki enam RT, dimana salah satu Dusunnya berada di seberang sungai Melawi yaitu Dusun Tapang Ria. Pemerintah Desa Tengkejau saat ini sedang berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan desa, salah satunya meningkatnya indeks kemiskinan di desa. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah KFM (kriteria fakir miskin) di Desa Tengkejau. Sebagaimana tercantum didalam PERDES BLTDD Desa Tengkejau Tahun 2024, jumlah KFM meningkat di tahun 2024 dengan jumlah KFM sebanyak 25 KK, sedangkan di Tahun 2023 jumlah KFM sebanyak 15 KK. Hal ini sedang dibenahi oleh Pemerintah Desa Tengkejau dengan melakukan beberapa realisasi program dengan melibatkan langsung masyarakat setempat sebagai penerima manfaat, dengan melakukan tahapan perencanaan melalui Musyawarah Desa untuk anggaran Tahun 2025.

Pemerintah Desa Tengkejau saat ini mengalami kemunduran dalam melakukan upaya-upaya menindaklanjuti masalah kemiskinan. Pemerintah Desa Tengkejau juga sedang memprakarsai hubungan berbagai elemen pendukung untuk pelaksanaan 4 kewenangan desa yang difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam pasal 6 Bab II, dikatakan bahwa kegiatan pemberdayaan dalam peningkatan mutu ekonomi kreatif menjadi salah satu prioritas pemerintah desa yang harus dituangkan dalam perencanaan pembangunan desa. Artinya pemerintah desa harus

menerapkan kegiatan pemberdayaan yang terfokus pada peningkatan ekonomi kreatif. Hal itu lah yang saat ini masih dilaksanakan pemerintah Desa Tengkejau bersama lembaga-lembaga dan Masyarakat Desa Tengkejau, agar dapat terciptanya tindakan untuk realisasi program di bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa Tengkejau. (Sitepu, 2007).

Prakarsa merupakan kemampuan untuk memulai atau menindaklanjuti rencana atau tugas secara energetik. Prakarsa juga merupakan tindakan awal atau dalam melaksanakan suatu gagasan oleh seseorang atau suatu organisasi. Artinya dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang tertuju pada peningkatan ekonomi kreatif, hal ini menjadi perencanaan yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah Desa Tengkejau dalam menindaklanjuti permasalahan kemiskinan serta menindaklanjuti regulasi terkait prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Salah satu pembahasan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD yaitu melakukan mufakat yang hasilnya yaitu memilih kegiatan pemberdayaan pengrajin besi dengan membentuk kelompok yang berisikan masyarakat yang terdiri dari beberapa perwakilan per KK nya. Kemudian Pemerintah Desa Tengkejau juga membuat Surat Keputusan Kepala Desa terhadap kelompok pengrajin besi yang dimana nantinya kelompok tersebut akan menjadi salah satu pendongkrak ekonomi kreatif di Desa Tengkejau. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti terhadap bagaimana prakarsa masyarakat dengan Pemerintah Desa Tengkejau dalam proses pembangunan di desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, di samping itu juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Sehubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, di tingkat desa terdapat lembaga yang salah satu fungsinya adalah menampung aspirasi masyarakat yaitu Badan permusyawaratan Desa, sebagai mitra kerja pemerintah desa. Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.

Berangkat dari itu, fenomena ini akan dikaji melalui prakarsa warga dan pemerintah Desa dalam sektor pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tengkejau, Kabupaten melawi, kalimantan barat. Prakarsa dari warga dan pemerintah dapat menghasilkan berbagai manfaat dan kemajuan di suatu daerah. Namun, sejauh ini proses prakarsa warga dan pemerintah Desa di Desa Tengkejau belum terlihat begitu maksimal antara warga dengan pemerintah Desa. Hal dilihat dari aspek pembangunan pemerintah Desa Tengkejau yang tidak melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu perlu adanya kajian mendalam dengan konteks studi ilmu pemerintahan mengenai prakarsa warga dan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan yang lebih efektif serta ada prakarsa antara warga dan pemerintah guna mengambil peran warga dan pemerintah. Penelitian ini

akan menggunakan analisis perspektif *governing* guna menganalisis bagaimana relasi pemerintah Desa Tengkejau dengan warga masyarakat. *Governing* dalam kajian ini akan mengacu pada prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat dalam berbagai program-program pembangunan yang akan dilakukan.

Penelitian ini pada dasarnya akan mengeksplorasi bagaimana prakarsa warga dan pemerintah Desa di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan barat melalui kebijakan, serta praktik-praktik pembangunan, maupun kerjasama yang akan dibangun. Penelitian ini berjudul: “**Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Governing di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat)**”. Yang dimana mengarah pada kepentingan warga dan pemerintah dalam proses pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana prakarsa warga dan pemerintah Desa di Desa Tengkejau dalam meningkatkan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah prakarsa warga dan pemerintah Desa Tengkejau dalam kerjasama serta program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.
2. Untuk memperoleh pemahaman terkait prakarsa warga dan pemerintah Desa Tengkejau. Hal ini dilakukan untuk mengetahui menyebabkan relasi pemerintah Desa dengan warga di Desa Tengkejau.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan peneliti yang mana digunakan untuk memfokuskan penelitian ini agar data dan informasi yang diteliti sesuai dengan kebutuhan dan menghindari bias terhadap data yang diambil oleh peneliti. Kendati demikian, dalam penelitian ini adapun yang menjadi fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Peran Kolaboratif antara Warga dan Pemerintah Desa dalam mengatasi kemiskinan. Fokus ini dapat membahas bagaimana warga dan pemerintah desa dapat bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Tengkejau.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Desa. Fokus ini dapat melihat bagaimana prakarsa masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti program ekonomi kreatif, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil, meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, termasuk pertumbuhan usaha lokal dan peningkatan pendapatan.



3. Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya pada Pembangunan Fisik dan Sosial. Fokus ini dapat melihat sejauh mana alokasi dan penggunaan dana desa berkontribusi pada perbaikan infrastruktur dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Ini juga dapat mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
4. Evaluasi Pengaruh Prakarsa pemerintah dan warga terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Fokus ini untuk menilai seberapa efektif kebijakan dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah desa dan warga untuk menurunkan angka kemiskinan di Desa Tengkejau. Fokus ini mencakup pengukuran dampak berbagai program pembangunan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan jumlah usaha kecil, akses terhadap pekerjaan tetap dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait kolaborasi antara warga dan pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Halnya juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam menganalisis strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat serta sebagai dasar bagi penelitian lanjutan terkait tata kelola desa yang efektif dan berkelanjutan.

## **2. Manfaat Praktis**

Bagi Pemerintah Desa Tengkejau, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Desa Tengkejau, khususnya pemerintah desa dalam merancang kebijakan pemberdayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

## **F. Literatur Riview**

Berdasarkan penelusuran Pustaka penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait yaitu:

*Pertama.* Pada artikel Novie Indrawati Sagita dengan judul “Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung”. Dari kajian itu menjelaskan bahwa Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara sangat berperan penting dalam evaluasi pencapaian kontrak kinerja kecamatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 2. No 2, Oktober 2016.

*Kedua.* Pada artikel oleh Rofi Irwan, Sudarman Mersa dan Joko Mulyono Rofi Irwan, Sudarman Mersa dan Joko Mulyono dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam pembangunan”. Pada kejadian itu menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jurnal ilmiah administrasi publik. Volume. 9, Nomor. 1, Januari-Juni 2018.

*Ketiga.* Pada artikel Hafay Aisyatu Huda, Utang Suwaryo, Novie Indraswari Sagita dengan judul “Pengembangan Desa berbasis *Smart Village*”. Jurnal ilmiah Ilmu pemerintahan. Dari kajian itu dapat dijelaskan bahwa

optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan desa di Desa Talagasari. Volume. 6, Nomor. 3, 2020.

*Keempat.* Pada artikel Ahmad Mustanir, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madeling, Mutmainna dengan judul “Peranan aparatur pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”. Dari kajian itu dapat dijelaskan bahwa peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal *clean government*. Volume. 2, Nomor. 1, Desember 2018.

*Kelima.* Pada artikel M. Riyanto, and V. Kovalenko dengan judul “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama,” *Pada kejadian tersebut* membahas pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan negara kesejahteraan, beserta tantangan dan hambatannya. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. vol. 5, no. 2, pp. 374-388, Jul. 2023.

*Keenam.* Pada artikel Dede Mariana dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan”. Dari kejadian itu menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, yakni melalui pendekatan struktural dengan

mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan pendekatan sosiokultural melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat. Jurnal ilmu pemerintahan. Vol.1 No.2, Oktober 2015

*Ketujuh.* Pada artikel Lily Sri Ulina Peranginangin dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Dari kajian itu bahwa kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi ini menjadi penting, karena seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Jurnal kebijakan dan administrasi publik. Vol 18, No 1 (2014).

*Kedelapan.* Pada artikel Alexander Buditjahjono Gedeona dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur”. Dari kajian itu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Yang dilakukan Kecamatan Larantuka bagian dari penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang Kecamatan Larantuka. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi. Jurnal kebijakan dan administrasi publik. Vol. 1 No. 3, 2019

*Kesembilan.* Pada artikel Adam Latif, Irwan Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, Muh Sutrisno dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di DESA TIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”. Dalam kajian tersebut menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan sangat baik dengan nilai persentase 80,25%. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan. Vol 5, No 1, 2019

*Kesepuluh. Pada artikel Andi Uceng, Erfina Erfina, Ahmad Mustanir, Sukri Sukri dengan judul “partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di DESA BETAO RIASE KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”. Dari kajian itu dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Betao Riase merupakan faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan yang ada di Desa Betao Riase. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan. Vol 5, No 2, 2019.*

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Prakarsa Warga**

Prakarsa warga adalah inisiatif yang diambil oleh masyarakat untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan mengatasi masalah yang ada di lingkungan mereka. Ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai penggerak perubahan.

Partisipasi masyarakat mencakup semua langkah, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga mengevaluasi hasil, menurut Isbandi, (2007). Ini menunjukkan bahwa prakarsa warga adalah proses proaktif yang melibatkan pemikiran kritis dan kreativitas masyarakat, bukan hanya reaksi terhadap kebijakan. Putra, I Ketut Candra, I Wayan

Suarjana, (2022) menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan bagaimana mereka ingin hidup mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, partisipasi warga memungkinkan masyarakat untuk membuat solusi yang sesuai dengan keadaan sosial budaya mereka. Ini meningkatkan identitas komunitas dan rasa memiliki terhadap program pembangunan.

Strategi yang diambil oleh masyarakat untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan mengatasi masalah yang ada di lingkungan mereka dikenal sebagai inisiatif warga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai penggerak perubahan. Partisipasi masyarakat mencakup setiap tahap proses, dari mengidentifikasi masalah hingga menilai hasilnya, menurut Isbandi (2007). Ini menunjukkan bahwa prakarsa warga bukan hanya respons terhadap kebijakan; itu adalah proses proaktif yang melibatkan kreativitas dan pemikiran kritis masyarakat. Candra Kusuma Putra (2023) mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk memilih cara hidup mereka sendiri. Partisipasi warga dalam situasi seperti ini memungkinkan masyarakat untuk membuat solusi yang sesuai dengan situasi sosial budaya mereka. Ini meningkatkan identitas komunitas dan rasa memiliki terhadap program pembangunan.

Dalam konteks "Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Governing di Desa Tengkejau, Kabupaten

Melawi, Kalimantan Barat)", prakarsa warga menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Ketika pemerintah desa dan prakarsa warga bekerja sama, mereka dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal, dan meningkatkan kemampuan desa untuk memerangi kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya warga tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh pemerintah desa.

## **2. Prakarsa Pemerintah Desa**

### **a. Pengertian Prakarsa Desa**

Prakarsa pemerintah desa dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan proaktif yang diambil oleh pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan. Menurut Prasjo & Kurniawan, (2008), pakar kebijakan publik dan reformasi birokrasi, prakarsa pemerintah desa mencakup: "Upaya sistematis dan terencana untuk mengoptimalkan potensi desa, mengatasi tantangan lokal, dan menciptakan inovasi dalam tata kelola desa yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017, inisiatif pemerintah desa terdiri dari

perencanaan dan pelaporan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk membuat kebijakan yang membantu masyarakat. Menurut Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014, pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan lokal dan kebijakan nasional. Dalam situasi seperti ini, upaya pemerintah desa harus dapat menggabungkan keinginan masyarakat dengan program pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah desa melakukan dua peran: melaksanakan dan mendorong perubahan sosial.

Dalam kaitannya dengan konteks "Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Governing di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat)", prakarsa pemerintah desa berperan penting dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menggabungkan kebutuhan lokal dengan kebijakan nasional, sehingga dapat menciptakan program yang tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masyarakat. Kerja sama antara pemerintah desa dan prakarsa warga menjadi kunci dalam mengidentifikasi masalah kemiskinan dan merumuskan solusi yang efektif. Misalkan melalui musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka



terkait program pembangunan yang diinginkan, sehingga pemerintah desa dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan inisiatif dari masyarakat desa. Dengan demikian, sinergi antara prakarsa warga dan pemerintah desa tidak hanya memperkuat kapasitas desa dalam memberantas kemiskinan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan, sehingga menciptakan keberlanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Tengkejau.

b. Aspek-Aspek Prakarsa

Prakarsa pemerintah desa meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, berupa:

- 1) Penyediaan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur)
- 2) Pertumbuhan Ekonomi Lokal
- 3) Manajemen Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa

c. Pendekatan Partisipatif

Menurut Diyanto et al., (2021), seorang ahli pembangunan pedesaan, mengatakan bahwa proyek pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program. Ini bukan hanya tentang

pemerintah desa yang berinisiatif, tetapi juga tentang bagaimana mereka mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa.

Dalam penelitian tentang Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Tengkejau, pendekatan partisipatif yang ditekankan oleh Diyanto et al., (2021) sangat relevan. Yuniningsih mengatakan bahwa untuk proyek pemerintah desa yang berhasil, masyarakat harus terlibat secara aktif di setiap tahap pembangunan, mulai dari menentukan kebutuhan hingga menilai program. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam menghasilkan program pembangunan desa yang efektif.

### **3. Kemiskinan**

Michael P. Todaro (dalam Safuridar, 2017) mengatakan kemiskinan absolut adalah ketika seseorang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang ini hidup di bawah garis kemiskinan atau di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu. Seperti yang dinyatakan oleh Asfia Murni (dalam Safuridar, S. 2017), kemiskinan, terutama kemiskinan di kota, terkait erat dengan kurangnya peluang kerja yang menguntungkan. Dengan memanfaatkan kehidupan kota, penduduk, baik pendatang (urbanis) maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan kerja, dapat menciptakan kesempatan

kerja. Dari perspektif ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:

- a. Secara makro, kemiskinan disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak seimbang. Penduduk miskin memiliki sumber daya terbatas dan kualitas rendah.
- b. Perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia menyebabkan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menghasilkan upah yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, nasib yang tidak beruntung, diskriminasi, atau keturunan.
- c. Perbedaan dalam akses modal menyebabkan kemiskinan.
- d. Di daerah perkotaan, peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh arus migran yang cepat. Akses pengairan yang terputus di beberapa subak-subak di daerah perkotaan mengubah perilaku petani. Petani akan menghadapi kesulitan dalam melakukan aktivitas produktif di pertanian jika mereka tidak dapat segera mengantisipasi perubahan tersebut. Agar petani dan masyarakat perkotaan mendapatkan manfaatnya, optimalisasi lahan yang telah terputus akses pengairannya harus segera dimulai.

Menurut Sahdan (dalam Safuridar, S. 2017), karena kemiskinan adalah masalah yang kompleks, penanganan kemiskinan juga

membutuhkan analisis menyeluruh yang melibatkan setiap aspek masalah. Dibutuhkan juga strategi pengendalian yang tepat, berkelanjutan, dan tidak temporer. Untuk melacak masalah kemiskinan, ada sejumlah variabel yang dapat digunakan. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan dihasilkan dari variabel ini.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi banyak masyarakat, termasuk di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Akibatnya, kedua pemerintah desa dan prakarsa warga sangat penting dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan menerapkan program pembangunan yang relevan, sedangkan prakarsa warga dapat mendorong partisipasi aktif dalam mengidentifikasi masalah lokal dan mengembangkan solusi. Dalam hal ini, upaya warga dan pemerintah desa dapat bekerja sama untuk membuat strategi pengurangan kemiskinan yang tepat dan berkelanjutan. Misalnya, dengan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Selain itu, optimalisasi lahan pertanian dan pengembangan infrastruktur dasar juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara warga dan pemerintah desa di Desa Tengkejau

sangat penting untuk menciptakan cara yang berhasil untuk memberantas kemiskinan secara berkelanjutan.

#### **4. *Governing***

*Governing* adalah proses mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam suatu organisasi. Konsep ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan ekonomi, yang mencakup pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Baik dalam konteks *good governance*, *governing* juga mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, transparansi, *rule of law*, *responsiveness*, *consensus-oriented*, *equality*, *effectiveness* and *efficiency*, dan *accountability*. Pemerintah melakukan transformasi dari manusia menjadi rakyat dan dari rakyat menjadi warga.

Fungsi, tindakan, proses, dan cara adalah contoh tindakan memerintah. Reformasi, inovasi, proteksi, distribusi, provisi, alokasi, rekognisi, intervensi, imposisi, emansipasi, penetrasi, integrasi, privatisasi, represi, koersi, dan tindakan lainnya adalah komponen dari konsep meso mikro pemerintahan (G2) (Peta Penelitian Pemerintahan, 2020). Oleh karena itu, meskipun memerintah mengandung perintah, memerintah tidak sama dengan perintah. Dalam bukunya yang berjudul "*Ruling but not Governing*" (2007), Stephen Cook menyatakan bahwa ada perbedaan antara memerintah dan menguasai. Gagasan ini berasal dari sejarah politik dan militer Mesir, di mana militer mendominasi politik dan kehidupan masyarakat. Namun, karena kekurangan

kemampuan untuk mengatur dan mengawasi, kekuatan militer ini tidak berfungsi sebagai pemerintah. Oleh karena itu, dominasi militer hanya berhenti pada tataran penguasaan. *Ruling* dalam hal ini juga dapat dianggap sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, yaitu tidak mengatur dan mengurus. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara *ruling* dan *governing*. *Ruling* memiliki arti penguasaan dan memiliki unsur dominasi, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, secara normatif, pemerintahan melekat pada pemerintah dan memiliki otoritas dan legitimasi untuk menjalankan pemerintahan. Secara umum, Pemerintahan adalah bentuk kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah. *Governing* diartikan sebagai sebuah kata kerja yang memerintah dimana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosakata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan.

*Governing* mencakup proses politik, hukum, dan administrasi, pembentukan kebijakan adalah tindakan penting pemerintah dalam *governing*. Dalam konteks ini, gagasan ideal adalah fungsi ekstraksi, distribusi, perlindungan, dan koersi yang dilakukan pemerintah atas negara, warga, dan masyarakat. Proses politik, hukum, dan administrasi adalah inti dari *governing* sebagai konsep identitas. Karena politik adalah kegiatan membuat keputusan, dan hukum dan administrasi adalah eksekusi teknis dari keputusan atau hukum tersebut. Konsep *governing* tidak terbatas pada kebijakan; fungsi utama pemerintah adalah

melindungi atau melindungi, bukan hanya mendorong. *Protection of law and order* serta *distribution of welfare* (kesejahteraan) adalah tugas utama pemerintah. Teknik mendukung pemerintahan politik, hukum, dan administrasi. Selain itu, pemerintah juga mencakup proses *connecting, crafting dan transforming* terhadap unsur-unsur berbeda untuk melahirkan kebijakan, hukum, dan lain sebagainya. Kebijakan adalah inti dari pemerintahan dan tindakan yang dilakukannya. Ilmu pemerintahan membahas kebijakan dari dasar hingga ujung, membahas konten, konteks, kontestasi, konstitutif, konsistensi, dan konsekuensi. Bahkan bisa juga bicara soal kontradiksi kebijakan. *Governing* adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus dan secara responsible mempertanggungjawabkan fungsi perlindungan (*protecting*) dan pendistribusian (*distributing*) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Eko, 2021).

*Governing*, sebagai proses pengaturan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat relevan membuat hubungan dengan konteks "Prakarsa Warga dan Pemerintah Desa dalam Memberantas Kemiskinan" di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Untuk memerangi kemiskinan, penting bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat dalam setiap tahap kebijakan publik. Dengan menggabungkan inisiatif warga dan dukungan pemerintah desa, proses *governing* dapat menciptakan sinergi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sutoro Eko (2021), fungsi utama pemerintah adalah melindungi dan mendistribusikan kesejahteraan kepada rakyat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan warga dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal akan memperkuat kapasitas desa dalam memberantas kemiskinan secara berkelanjutan.

#### **H. Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif eksplanatif bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih dalam daripada sekadar memberikan deskripsi fenomena. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif eksplanatif tidak hanya memberikan deskripsi fenomena tetapi juga berusaha untuk memahami mekanisme dan alasan di balik hubungan sebab-akibat antara berbagai faktor yang membentuk fenomena sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana tindakan warga dan pemerintah desa mempengaruhi satu sama lain dalam upaya pemberantasan kemiskinan di Desa Tengkejau.

Peneliti mencoba menjelaskan bagaimana dan mengapa tindakan warga dan pemerintah desa mempengaruhi satu sama lain dalam upaya untuk memerangi kemiskinan di Desa Tengkejau. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya akan menjelaskan apa yang dilakukan warga dan pemerintah desa, tetapi mereka juga akan mengurai dinamika interaksi yang terjadi di antara mereka



dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dan berdampak pada interaksi ini. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang cara kerjasama warga dan pemerintah desa dapat mempengaruhi seberapa efektif program pengentasan kemiskinan.

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

### **2. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah “Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat”

### **3. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 7 orang informan subyek penelitian berupa Kepala Desa Tengkejau, Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh masyarakat, Warga desa yang terlibat dalam prakarsa pembangunan, dengan menggunakan teknik purposive. Pilihan metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa subjek penelitian yang dipilih memiliki hubungan dengan objek penelitian, yang berarti mereka diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan masalah. Peneliti memilih narasumber berdasarkan kriteria tertentu untuk penelitian ini. Mereka yang terlibat secara langsung, memiliki otoritas, memperoleh keuntungan, dan membuat konsekuensi.

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat dan dijamin kualitasnya maka sebelum menentukan subjek/informan penelitian akan dilakukan *overview* atau penjajakan terhadap informan yang dianggap *representative* memberikan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya barulah ditentukan subjek /informan. Informan awal dipilih orang yang dapat membuka jalan untuk menentukan informan berikutnya dan berhenti apabila data yang dibutuhkan sudah cukup. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara dipilih secara sengaja yaitu orang yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap masalah, melalui wawancara mendalam (*in depth interview*). Informan yang dipilih berasal dari Desa Tengkejau, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan informan utama yang memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Beliau memiliki pemahaman mendalam tentang situasi masyarakat dan metode pengentasan kemiskinan di Desa Tengkejau sebagai kepala desa. Kepala Desa mengutamakan musyawarah dan gotong royong dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa selama kepemimpinannya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertanggung jawab untuk mengelola dan mencatat program desa. Informasi ini memahami secara mendalam proses

perencanaan, implementasi, dan evaluasi program desa, termasuk pengelolaan dana desa. Selain itu, dia bertanggung jawab untuk memastikan anggaran desa transparan dan akuntabel.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD mewakili masyarakat dan mengawasi dan merencanakan pembangunan desa. Informasi dari BPD memberikan perspektif tentang aspirasi masyarakat dan mengawasi program pengentasan kemiskinan. Informasi dari BPD juga terlibat dalam musyawarah desa dan penilaian program pembangunan.

4. Masyarakat

Masyarakat memiliki pandangan langsung tentang cara program desa dijalankan dan bagaimana hal itu berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan. Mereka berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa dan berbagai program pemberdayaan ekonomi.

**Tabel 1. 1 Data Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Syaifullah	Kepala Desa
2.	Erick Kantona	Sekretaris Desa
3.	Milton Crosby	BPD Desa
4.	Margareta Lusiana	Pengurus PKK
5.	Maria Gidong	Pengurus Kelompok Tani
6.	Andreas Abas	Pemuka Adat
7.	Albertus Abu	Masyarakat

*Sumber: Data Penelitian Tahun 2024*

Dalam upaya memberantas kemiskinan di Desa Tengkejau, keempat informan ini dipilih karena masing-masing memiliki peran dan perspektif yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Para informan memiliki pengalaman langsung dalam prakarsa pembangunan desa dan dapat memberikan informasi menyeluruh tentang upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Selama proses pengumpulan data, informan menunjukkan keterbukaan dalam memberikan informasi dan memiliki pemahaman yang baik tentang program-program pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa kerja sama dan gotong royong, nilai kearifan lokal,

sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Desa Tengkejau.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah pengertian dari masing-masing teknik pengumpulan data.

##### **a. Observasi**

Untuk mengumpulkan data, observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap elemen-elemen yang muncul dalam gejala yang diamati pada subjek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat berupa:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam program pemberantasan kemiskinan, mengamati tingkat partisipasi warga desa dalam program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, seperti pelatihan, gotong royong, atau pembentukan kelompok usaha.
- 2) Peran pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan, mengamati kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan dan pembangunan infrastruktur.

- 3) Mengamati kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa, mengawasi tingkat kemiskinan, mata pencaharian, pendidikan, dan akses ke fasilitas dasar seperti kesehatan dan air bersih di Desa Tengkejau
- 4) Mengamati kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa, mengawasi cara warga dan pemerintah desa bekerja sama untuk membuat dan menerapkan program dalam penanggulangan kemiskinan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tengkejau, Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh masyarakat, Warga desa yang terlibat dalam prakarsa pembangunan. Peneliti mewawancarai lebih dari satu orang untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang dan tidak hanya dari satu atau dua orang.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi menggunakan catatan peristiwa yang lalu sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan (seperti peraturan, website, komputer, alat, atau kebijakan) ataupun foto.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Miles dan Huberman 2007 (dalam et al., 2018) yang menyatakan ada 3 (Tiga) macam analisis data yaitu diawali reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Salah satu metode analisis data kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data adalah jenis analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat digunakan pada akhirnya.

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Salah satu cara analisis data kualitatif adalah penyajian data, yang berarti menyusun informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif adalah teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan).

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final. Data yang diperoleh dari lapangan yaitu cara berpikir dimulai analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan. (Suyitno, 2018)

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEMISKINAN DI DESA TENGAJAU**

Dalam pembicaraan tentang gambaran umum kondisi Desa, akan dibahas kondisi Desa serta kondisi Pemerintahan Desa dalam setahun terakhir, disertai dengan data yang terkait dengan Pemerintahan Desa. Salah satu aspek kondisi yang harus diperhatikan sebagai ruang dan subjek pembangunan adalah kondisi Desa. Kondisi Desa ini didasarkan pada sejarah, demografi (kependudukan), sosial, dan ekonomi masyarakat.

#### **A. Sejarah Desa Tengkejau**

Sejarah Desa Tengkejau. Desa ini didirikan pada tahun yang tidak diketahui, tetapi sejarahnya dikaitkan dengan migrasi penduduk dari seluruh Kalimantan Barat. Nama desa, "Tengkejau", berasal dari kata Dayak yang berarti "tanah yang tinggi", yang mencerminkan lingkungan desa yang terletak di daerah perbukitan rendah. Desa Tengkejau berkembang menjadi salah satu desa di Kecamatan Pinoh Utara dengan potensi pertanian yang besar. Pada awalnya, beberapa keluarga Dayak yang mencari tempat tinggal baru untuk bercocok tanam dan berburu tinggal di desa ini. Pendatang dari daerah lain menambah keragaman budaya dan tradisi Desa Tengkejau.

Konon katanya nama desa Tengkejau, diambil dari nama salah satu sungai terdekat. Sungai tersebut bernama sungai Tengkejau. Asal-usul Desa Tengkejau sendiri, di beri nama oleh salah satu kepala kampung di desa Tengkejau. Kepala kampung saat itu diduduki oleh bapak Kanau. Bapak



Kanau sendiri, ditunjuk oleh masyarakat sekitar untuk menduduki posisi kepala kampung. Masa itu legislasi kepala kampung berisikan struktur organisasi berupa Kepala kampung dan kabayan yang menduduki pemerintahan saat itu. Saat itu juga Desa Tengkejau belum berbentuk desa, hal itu dikarenakan sistem pemerintahan desa belum memasuki daerah tersebut.

Desa Tengkejau akhirnya diakui menjadi sebuah desa setelah terpilihnya kepala desa pertama yang diduduki oleh Ibu Ros Senah. Sehingga sistem pemerintahan desa berlanjut sampai saat ini. Berikut penjabaran masa pemerintahan Desa Tengkejau dan nama-nama kepala desa yang pernah menjabat

## **B. Keadaan Geografis Desa Tengkejau**

Desa Tengkejau merupakan sebuah desa yang terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Tengkejau, Dusun Tapang Ria, Dusun Batu Randuk, dan Dusun Sinder Olok. Secara geografis, desa ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah yang dimana setelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Kayan, di Selatan berbatasan dengan Desa Melamut Bersatu, di Barat berbatasan dengan Desa Nanga Belimbing dan Desa Nanga Kayan, serta di Timur berbatasan dengan Desa Senibung.

Topografi desa ini beragam, dengan lahan yang datar, bergelombang, hingga curam, dan ketinggiannya bervariasi di atas permukaan laut. Iklim di Desa Tengkejau memiliki suhu rata-rata 30°C, dengan curah hujan antara

2000 hingga 3000 mm per tahun, serta kelembaban udara dan kecepatan angin yang sesuai dengan iklim tropis.

Lahan di Desa Tengkejau terbagi menjadi beberapa penggunaan. Lahan pertanian mencakup 150 hektar, sementara lahan perkebunan terdiri dari 1150 hektar untuk karet dan 350 hektar untuk sawit. Selain itu, terdapat 1500 hektar lahan hutan dan 30 hektar lahan pemukiman.

Desa Tengkejau berada di Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini memiliki total 396 hektar, dengan 198 hektar digunakan sebagai perkebunan rakyat. Batas-batas desa secara geografis adalah:

1. Desa Kayan Sempau terletak di Kecamatan Pinoh Utara di sebelah utara.
2. Desa Melamut Bersatu terletak di Kecamatan Pinoh Utara di sebelah selatan.
3. Desa Senibung terletak di Kecamatan Pinoh Utara di sebelah timur.
4. Desa Sopan Tonak, yang terletak di Kecamatan Belimbing, terletak di sebelah barat.

Kondisi iklim Desa Tengkejau cenderung tropis dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun. Hal ini mendukung potensi pertanian dan perkebunan sebagai sektor utama ekonomi desa. Meskipun sebagian besar lahan digunakan untuk perkebunan, keberadaan sungai kecil yang melintasi wilayah ini menjadi sumber air utama bagi kegiatan domestik dan irigasi.

### **C. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Tengkejau**

#### **1. Visi**

“Terwujudnya Desa Tengkejau sebagai desa berbasis pertanian, desa swadaya, desa yang cerdas, desa harmonis dan sejahtera.”

#### **2. Misi**

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa.
- c. Meningkatkan SDM masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terampil dan inovatif.

### **D. Data Kemiskinan Desa Tengkejau**

Berdasarkan musyawarah pencermatan dokumen Penerima Bantuan Pangan dan *Cleansing* Bersama (BNBA), data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nasional, maka diuraikan sebagai berikut jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori keluarga miskin di Desa Tengkejau:

**Tabel 2. 1 Data BNBA Keluarga Miskin**

<b>Bantuan Sosial Tunai (BST)</b>	<b>Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)</b>	<b>Program Keluarga Harapan (PKH)</b>	<b>Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)</b>
47 KPM	57 KPM	45 KPM	25 KPM
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>174 KPM</b>

*Sumber: data BNBA DTKS 2024*

Berdasarkan hasil musyawarah pencermatan dokumen BNBA Data DTKS Nasional, ditunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori keluarga miskin di Desa Tengkejau tercatat sebanyak 174 KPM. Jumlah ini mencerminkan tingkat kemiskinan di Desa Tengkejau yang terbagi dalam beberapa skema bantuan sosial, yaitu BST (47 KPM), BPNT (57 KPM), PKH (45 KPM), dan BLT-DD (25 KPM).

Dari data ini, program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) memiliki jumlah penerima tertinggi yaitu 57 KPM yang menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masih menjadi prioritas utama bagi sebagian besar keluarga miskin di Desa Tengkejau. Selanjutnya BST (Bantuan Sosial Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) juga berkontribusi signifikan dalam memberikan dukungan ekonomi kepada 47 KPM dan 45 KPM. Sementara itu BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yang diberikan kepada 25 KPM menunjukkan

bahwa pemerintah desa juga berperan aktif dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui alokasi dana desa.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa data diatas menggambarkan tingkat kemiskinan di Desa Tengkejau masih cukup tinggi, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan dalam hal pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Program bantuan sosial yang telah berjalan perlu terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

## **E. Kelembagaan Desa Tengkejau**

### **1. Kondisi Pemerintahan Desa Tengkejau**

Kondisi pemerintahan Desa Tengkejau saat ini masih terbilang cukup baik, dimana kegiatan pelayanan publik masih berjalan dengan berpusat terhadap masyarakat. Kegiatan-kegiatan terkait pemerintahan desa juga berjalan sesuai mekanisme yang ada, dengan sistem pelayanan pemerintahan Desa Tengkejau yang dinamis, humanis, dan profesional. Hal ini juga dilaksanakan sesuai prosedur sistem pemerintahan yang baik dengan mengutamakan pada pembangunan Desa Tengkejau yang berkelanjutan. Kesuksesan kegiatan dan pelayanan di Desa Tengkejau juga tidak lari dari tersedianya media dan prasarana pendukung kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan dan pelayanan publik pemerintahan Desa Tengkejau berjalan dengan baik.

Fokus utama pelayanan publik yang berpusat ke masyarakat dilakukan secara humanis, sehingga masyarakat dengan mudah menerima dan memahami setiap kebijakan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Tengkajau.

## **2. Kelembagaan Desa Tengkajau**

### **a. Lembaga Adat**

Kegiatan pembangunan di Desa Tengkajau selama berjalan juga dibantu oleh hadirnya kelembagaan masyarakat baik lembaga aportoais maupun lembaga non aportoais. Kelembagaan non aportoais yang saat ini masih berjalan yaitu lembaga adat. Kegiatan dalam lembaga adat yang diketuai oleh temenggung saat ini, masih berjalan sesuai mekanisme yang ada. Kegiatan-kegiatan terkait adat istiadat juga berjalan sebagaimana mestinya. Dimana fokus utama kelembagaan tersebut yaitu pelestarian budaya lokal baik itu kegiatan tradisi, acara pernikahan, acara pesta rakyat, dan hukum adat yang menjadi landasan acuan dalam menjadikan Desa Tengkajau yang aman, tentram, dan damai.

### **b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**

Kegiatan lembaga BPD selain berfokus pada pelayanan publik, juga turut hadir dalam membantu kegiatan pemerintahan pada pelaksanaan perencanaan pembangunan. Kondisi di dalamnya juga terbilang cukup baik, walaupun masih ada kekurangan pada kuantitas pelaksanaan kegiatan BPD, namun hal itu dapat hadapi dengan

kerjasama kelembagaan yang solid, sehingga proses kegiatan pemerintahan berjalan dengan lancar sampai saat ini.

c. LPM Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan yang saat ini masih berjalan yaitu (a), menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (b) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan (c) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

**F. Adat Istiadat**

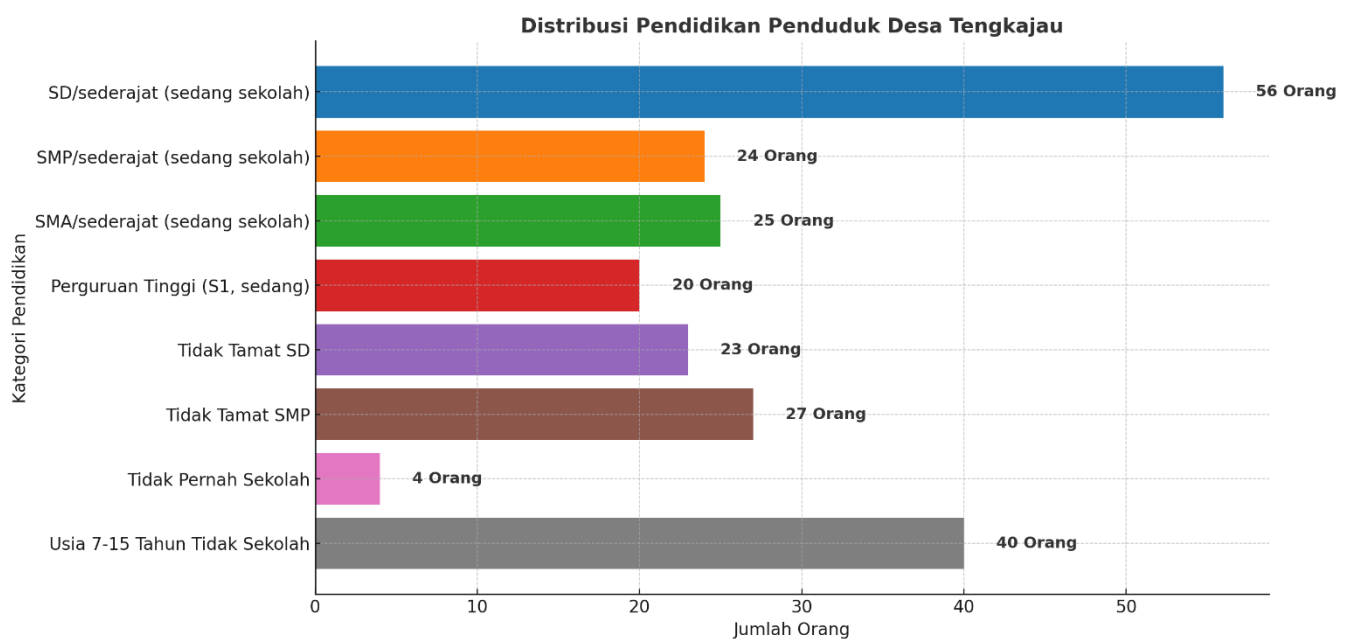
Masyarakat Desa Tengkajau sangat berpegang teguh pada adat istiadat, selain aturan agama dan aturan pemerintah aturan atau norma adat istiadat juga sangat dipatuhi oleh masyarakat. Untuk masyarakat dengan mayoritas Suku Dayak Randuk Desa Tengkajau sendiri memiliki beberapa acara adat yang dilakukan setiap tahunnya seperti acara gawai adat tutup tahun sub suku dayak randuk yang dilakukan sekali dalam setahun yang di mana kegiatan adat ini sebagai ucapan syukur kepada yang maha kuasa atas panen padi yang dirasakan masyarakat dan juga ada kegiatan tolak bala yang dilakukan hampir setahun

sekali yang di mana kegiatan adat ini sebagai ritual untuk menolak segala hal-hal buruk yang dapat menimpa masyarakat desa Tengkejau

## G. Kondisi Demografi

Desa Tengkejau memiliki total 681 penduduk, terdiri dari 360 pria dan 321 wanita, dengan 208 kepala keluarga (KK). Desa ini memiliki populasi 7,09 orang per kilometer persegi. Kelompok usia produktif mendominasi struktur usia penduduk.

**Grafik 2. 1 Pendidikan Desa Tengkejau**



*Sumber: Dok Profil Desa Tengkejau 2023*

Berdasarkan data pendidikan penduduk Desa Tengkejau, terdapat 618 penduduk, namun hanya 236 orang yang secara langsung terdaftar memiliki pendidikan formal hingga tingkat perguruan tinggi. Untuk memahami kondisi



pendidikan lebih dalam, peneliti melakukan analisis terhadap sisa 445 orang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Penduduk yang Masih Bersekolah

Dari total penduduk, terdapat beberapa kelompok yang saat ini masih dalam proses pendidikan:

- a. 56 orang sedang menempuh pendidikan di SD/Sederajat.
- b. 24 orang sedang menempuh pendidikan di SMP/Sederajat.
- c. 25 orang sedang menempuh pendidikan di SMA/Sederajat.
- d. 20 orang sedang berkuliah di perguruan tinggi (S1).

Total penduduk yang masih aktif dalam dunia pendidikan adalah 125 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda masih memiliki akses ke pendidikan, meskipun jumlahnya menurun di tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi.

2. Kelompok Penduduk yang Tidak Menyelesaikan Pendidikan

Beberapa penduduk pernah bersekolah tetapi tidak menyelesaikan jenjang pendidikannya:

- a. 23 orang tidak tamat SD.
- b. 27 orang tidak tamat SMP.

Kelompok ini bisa jadi menghadapi berbagai tantangan baik dalam bentuk ekonomi, akses transportasi, atau kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai.

### 3. Kelompok Penduduk yang Tidak Pernah Bersekolah

Dari data yang tersedia, ditemukan bahwa 4 orang berusia 18-56 tahun tidak pernah menginjakkan kaki pada pendidikan yang formal. Meskipun jumlah relatif kecil, ini tetap menunjukkan bahwa ada individu yang tidak mendapatkan akses pendidikan dasar.

### 4. Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah

Salah satu perhatian utama adalah kelompok 40 anak usia 7-115 tahun yang tidak bersekolah. Ini menjadi indikator adanya masalah dalam partisipasi pendidikan dasar, yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

## H. Mata Pencarian dan Ekonomi

Mayoritas warga Desa Tengkejau adalah petani. Data mata pencarian terdiri dari berikut:

**Tabel 2. 2 Mata Pencarian**

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	217 Orang
2.	Buruh Tani	1 Orang
3.	Wiraswasta	3 Orang
4.	Belum bekerja	58 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>279 Orang</b>

*Sumber: Profil Desa Tengkejau 2023*

Kondisi ekonomi dan mata pencarian di Desa Tengkejau menunjukkan kesulitan yang dihadapi dalam pemberantasan kemiskinan. Sebanyak 217 orang yang tinggal di sana bergantung pada pertanian konvensional sebagai sumber pendapatan mereka. Namun, tingkat

produktivitas yang rendah dan diversifikasi ekonomi yang rendah membuat industri ini rentan terhadap cuaca ekstrim, keterbatasan akses pasar, dan fluktuasi harga komoditas. Meskipun demikian, hanya tiga orang yang berpartisipasi dalam wiraswasta, menunjukkan bahwa sektor usaha kecil masih belum mencapai kemajuan yang ideal, meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Selain itu, 58 orang, termasuk mahasiswa, tidak memiliki pekerjaan. Sumber daya manusia yang dapat diberdayakan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke pekerjaan produktif adalah kelompok ini. Di sektor kerajinan rumah tangga dan perdagangan eceran, ada usaha kecil yang menunjukkan adanya prakarsa lokal, tetapi kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan masih rendah.

Dalam konteks penelitian "Prakarsa Warga dan Pemerintahan Desa dalam Memberantas Kemiskinan di Desa Tengkejau" Peran kolaboratif antara pemerintah dan warga dalam memerangi kemiskinan menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Pemerintah desa dapat membantu pertumbuhan sektor non-pertanian melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses modal usaha. Sementara itu, warga desa dapat berperan aktif dengan memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kehidupan mereka. Keberlanjutan inisiatif ini juga bergantung pada dukungan kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, seperti peningkatan koperasi desa, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan akses pasar. Sinergi ini akan membangun fondasi ekonomi desa yang lebih kuat dan inklusif sekaligus mengurangi ketergantungan pada pertanian.

## I. Sarana dan Prasarana

### 1. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung tugas pemerintahan, Desa Tengkejau memiliki sarana dan prasarana pemerintahan. Tabel berikut menunjukkan sarana dan prasarana yang dimaksud:

**Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Desa Tengkejau**

Kategori	Prasarana dan Sarana	Jumlah/Deskripsi
Transportasi	Panjang jalan konblok	1 km (kondisi rusak)
	Jalan Tanah	-
Kesehatan	Posyandu	1 unit
	Bidan	1 orang
Pendidikan	Play Group	2 unit (18 siswa)
	SD	1 unit (40 siswa)
	SMP	1 unit (43 siswa)
Energi	Genset pribadi	40 unit
	Lampu minyak tanah	Digunakan oleh 20 keluarga
Prasarana Lain	Gereja Kristen Protestan	2 unit
	Gereja Katolik	2 unit
	Lapangan voli	2 unit

*Sumber: Profil Desa Tengkejau 2023*

Berdasarkan data di atas meskipun ada beberapa keterbatasan, Desa Tengkejau memiliki infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan masyarakat. Karena tidak ada jalan tanah dan satu-satunya jalan konblok sepanjang 1 km dalam kondisi rusak, transportasi di desa ini masih sulit. Mobilitas penduduk dan pengangkutan hasil pertanian dapat dipengaruhi oleh aksesibilitas ini. Satu unit posyandu di bidang kesehatan berfungsi sebagai fasilitas kesehatan dasar yang didukung oleh satu bidan. Namun, fasilitas ini perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Dalam bidang pendidikan, desa memiliki 2 kelompok permainan dengan 18 siswa, 1 SD dengan 40 siswa, dan 1 SMP dengan 43 siswa. Jumlah ini menunjukkan upaya untuk menyediakan pendidikan dasar, meskipun akses ke pendidikan menengah dan atas masih terbatas. Dalam hal energi, 40 unit genset pribadi digunakan oleh masyarakat, dan 20 keluarga masih bergantung pada lampu minyak tanah. Prasarana lain termasuk dua gereja Kristen Protestan, dua gereja Katolik, dan dua lapangan voli. Fasilitas ini menunjukkan bahwa fasilitas keagamaan dan olahraga sangat penting bagi aktivitas sosial dan spiritual masyarakat.

Namun, desa ini masih bergantung pada sumber daya yang terbatas untuk energi. Sebanyak 40 genset pribadi digunakan oleh masyarakat, dan 20 keluarga masih bergantung pada lampu minyak tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses ke listrik murah dan stabil masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Akses lebih baik ke energi terbarukan atau listrik dari jaringan utama dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat Desa Tengkejau juga memiliki fasilitas sosial dan keagamaan yang sangat baik. Dua gereja Kristen Protestan dan dua gereja Katolik menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan dan spiritual sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan sosial yang memperkuat hubungan masyarakat. Selain itu, ada dua lapangan voli di desa, menunjukkan betapa pentingnya olahraga untuk warga desa sebagai

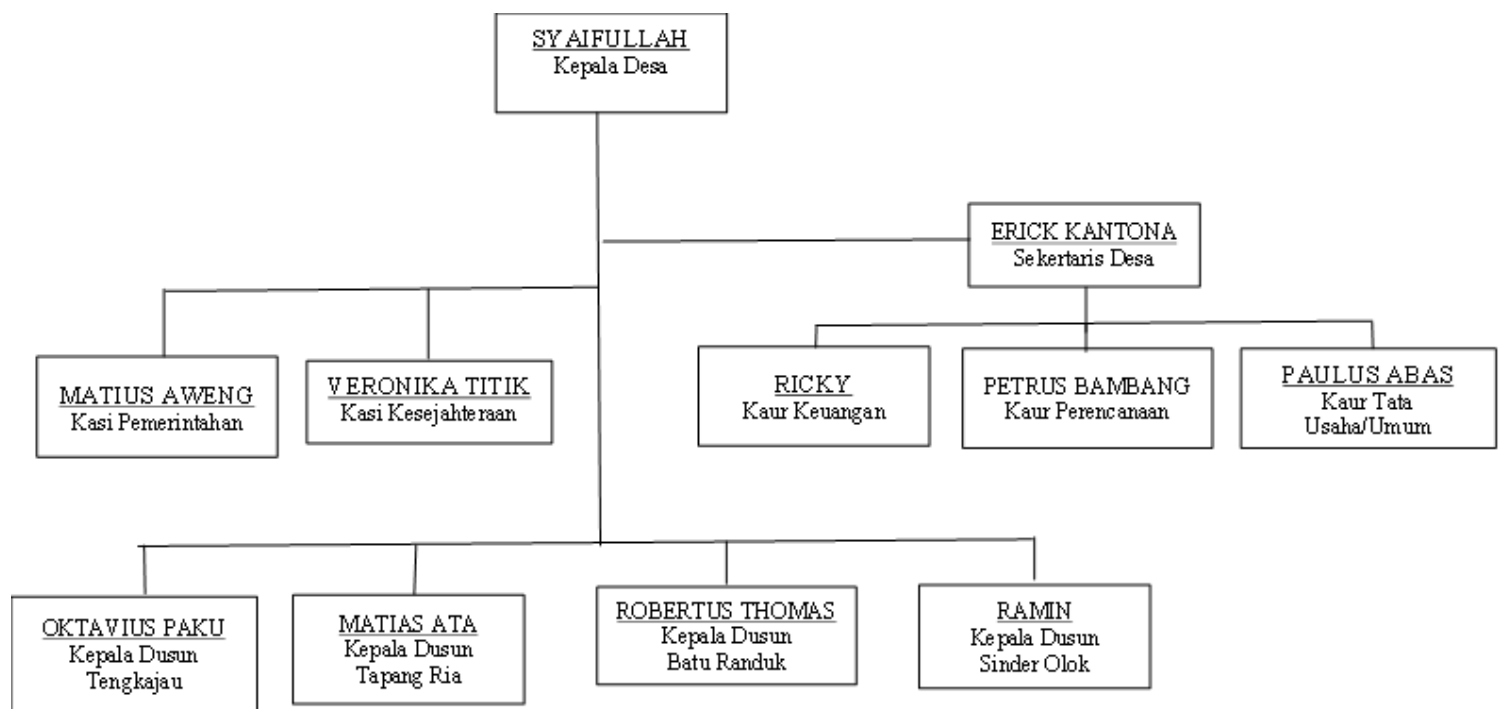
aktivitas rekreasi dan cara untuk berkumpul dengan orang lain. Tempat olahraga ini dapat membantu meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan solidaritas sosial.

Secara keseluruhan, desa ini telah membuat kemajuan dalam hal pendidikan dasar, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olahraga, tetapi masih ada masalah dengan akses ke pendidikan lanjutan dan energi. Meningkatkan infrastruktur energi dan pendidikan, serta memperkuat fasilitas sosial yang ada, dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

## **2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tengkejau**

Institusi dan lembaga utama sebagai mitra kerja dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur aktivitas dan dinamika masyarakat desa. Struktur organisasi Pemerintah Desa Tengkejau dirancang untuk memastikan bahwa tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar. Organisasi ini terdiri dari berbagai komponen yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tertentu, mulai dari Kepala Desa, yang berfungsi sebagai pemimpin tertinggi, hingga perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan desa. Untuk menjamin koordinasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan Desa Tengkejau, struktur organisasi berikut ini dibuat.

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tengkejau**



*Sumber: Profil Desa Tengkejau 2023*

Struktur ini menunjukkan bahwa hubungan koordinasi dan tanggung jawab antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan perangkat desa telah diatur dengan baik. Namun, dengan menyebutkan bidang tugas khusus dari masing-masing perangkat, data ini dapat dibangun untuk analisis lebih lanjut. Misalnya, Anda dapat mengatakan bahwa Ricky dan Matius Aweng menangani pemerintahan, keuangan, atau pembangunan. Ini akan membuat pembagian tanggung jawab menjadi lebih jelas.

Struktur pemerintahan desa ini menunjukkan bahwa hubungan dan tanggung jawab antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa lainnya telah diatur dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ada tata kelola yang terorganisir dan jelas dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Mencatat bidang tugas khusus dari masing-masing perangkat desa penting untuk meningkatkan analisis dan menjamin akuntabilitas. Pembagian pekerjaan akan menjadi lebih jelas, efektif, dan terarah jika peran dan tanggung jawab didefinisikan dengan lebih rinci.

Sebagai contoh, Ricky dan Matius Aweng dapat diberi tugas khusus dalam bidang tertentu, seperti pemerintahan, keuangan, atau pembangunan. Ricky dapat berkonsentrasi pada urusan administrasi pemerintahan, seperti menjaga dokumen resmi, bekerja sama dengan lembaga pemerintah tingkat atas, dan memastikan bahwa peraturan desa diterapkan. Sementara itu, Matius Aweng dapat berkonsentrasi pada urusan keuangan, seperti mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pelaporan. Selain itu, jika ada perangkat desa lain yang bertanggung jawab atas pembangunan, mereka dapat mengawasi proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Dengan pembagian tugas yang jelas seperti ini, setiap perangkat desa dapat mencurahkan lebih banyak perhatian pada pekerjaan yang mereka lakukan di bidang mereka sendiri. Akibatnya, kinerja pemerintahan desa dapat diukur dengan lebih baik. Selain itu, ini membantu masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu bidang tertentu, sehingga komunikasi dan koordinasi lebih mudah. Selain itu, transparansi dalam



pembagian tanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa karena mereka akan memiliki pemahaman yang jelas tentang cara sumber daya digunakan dan untuk kepentingan desa.

Secara keseluruhan, sistem pemerintahan desa yang teratur ini dapat ditingkatkan lagi dengan menetapkan bidang tugas khusus untuk setiap perangkat desa. Metode ini tidak hanya memperjelas siapa yang bertanggung jawab apa, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, produktivitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, desa dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan dan memanfaatkan peluang untuk memperbaiki diri.

### **BAB III**

#### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Kolaboratif antara Warga dan Pemerintah Desa dalam mengatasi kemiskinan**

Peran Kolaboratif antara Warga dan Pemerintah Desa dalam mengatasi kemiskinan Menurut temuan penelitian, ada beberapa aspek kerja sama antara warga dan pemerintah Desa Tengkejau:

###### **1. Musyawarah Desa**

Dari hasil wawancara Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) mengatakan forum musyawarah desa membantu warga bekerja sama dengan pemerintah desa:

“Antara warga dan pemerintah Desa dalam proses pembangunan desa dapat dilihat dari program-program yang selama ini berjalan dilakukan dengan cara disepakati dalam bentuk musyawarah desa di mana di dalamnya dihadiri oleh tokoh-tokoh lembaga ataupun tokoh masyarakat dan serta Pemerintah desa itu sendiri.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024):

“Proses Kerjasama antara pemerintah Desa Tengkejau dengan masyarakat dapat dilihat dari beberapa mekanisme yang sudah terukur dalam visi dan misi kepala desa terpilih. Sampai saat ini, Kerjasama tersebut berjalan cukup baik. Hal itu dilihat dari antusias masyarakat terlibat dalam program-program pemerintah desa dalam proses realisasi program desa di setiap tahun anggaran berjalan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa musyawarah desa juga memainkan peran penting sebagai tempat warga berkolaborasi dengan pemerintah Desa Tengkejau selama proses

pembangunan. Kepala Desa mengatakan bahwa musyawarah desa melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, lembaga, dan pemerintah desa, untuk menyepakati program pembangunan. Sekretaris Desa mendukung pernyataan ini, mengatakan bahwa kerja sama ini didasarkan pada visi dan misi kepala desa terpilih, dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan program setiap tahun anggaran. Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi juga menunjukkan kemandirian komunikasi, koordinasi, dan transparansi dalam pelaksanaan program. Desa Tengkejau menjadi contoh praktik pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dan menghasilkan kolaborasi yang produktif dengan pendekatan berbasis musyawarah yang inklusif.

## 2. Sistem Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif didefinisikan sebagai metode yang melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Sumarsono (2012), perencanaan ini melibatkan warga masyarakat dalam merumuskan visi, misi, dan agenda pembangunan, sehingga mereka memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Endah Septianingrum juga menekankan bahwa perencanaan partisipatif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan publik, sehingga meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024) menjelaskan mekanisme perencanaan partisipatif:

“Mekanisme komunikasi dalam merencanakan program pembangunan selalu dilakukan secara sistematis. Misalnya saat ini pemerintah desa melakukan perencanaan program pembangunan diawali dengan melakukan musyawarah desa perencanaan pembangunan atau musyawarah RKPDes, dengan melibatkan Lembaga, masyarakat, BPD, dan lain-lain”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Milton Crosby selaku BPD pada (19 November 2024):

“Komunikasinya dilakukan dengan cara melibatkan unsur masyarakat melalui kegiatan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan Pemerintah Desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Desa Tengkejau menerapkan sistem perencanaan partisipatif dengan menggunakan mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai bagian masyarakat. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa perencanaan program pembangunan dilakukan secara sistematis dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait, masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pihak-pihak lainnya yang berpartisipasi dalam forum musyawarah RKPDes. BPD juga memperkuat pernyataan ini dengan mengatakan bahwa unsur masyarakat terlibat secara aktif dalam musyawarah desa yang diselenggarakan bersama oleh BPD dan pemerintah desa. Metode ini menunjukkan upaya untuk membuat perencanaan yang inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan

masyarakat. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas program pembangunan di desa.

### 3. Pelaksanaan Program

Program Berbasis Swakelola adalah metode pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara mandiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan memberikan dorongan kepada masyarakat lokal (A. Sopian 2018).

Dari hasil wawancara Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) menjelaskan tentang implementasi program swakelola:

“Swakelola Di mana para program yang sifatnya swakelola itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri Seperti hal contohnya dalam program pembangunan jalan usaha tani sebagai aspek untuk menyelesaikan program-program tersebut masyarakat akan ditunjuk langsung sebagai ahli khusus di lapangan.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024):

“Program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah desa dilakukan secara swakelola, artinya realisasinya tetap akan melibatkan kelompok masyarakat atau Lembaga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pengadaan dan pelaksanaan program pembangunan di Desa Tengkejau dalam pelaksanaan program berbasis swakelola. Menurut Kepala Desa, Bapak Syaifullah, pembangunan jalan usaha tani adalah salah satu contoh program swakelola yang melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga

kerja ahli. Hal ini menunjukkan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan membuat mereka lebih terlibat dalam pembangunan desa. Bapak Erick Kantona, S.Pd., Sekretaris Desa, mendukung pernyataan ini dengan mengatakan bahwa pelaksanaan program swakelola selalu melibatkan kelompok masyarakat atau lembaga yang bekerja sama untuk mencapainya. Metode ini tidak hanya meningkatkan pengelolaan anggaran tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal, menumbuhkan rasa memiliki, dan meningkatkan kerja sama antara warga dan pemerintah desa.

#### 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Sejauh mana individu atau kelompok masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau proyek pembangunan disebut tingkat partisipasi masyarakat, yang sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas, program dapat lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Indriani, C. 2021).

Dari hasil wawancara Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) menyampaikan tingkat partisipasi masyarakat:

“Terkait dengan partisipasi masyarakat untuk program-program yang memang sudah ada di dalam dokumen rkp memang saat ini berjalan dengan lancar namun partisipasi masyarakat sangat antusias dalam mendukung program-program yang ada.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Milton Crosby selaku BPD pada (19 November 2024):

“Sangat baik, mengingat sampai saat ini masyarakat masih ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan desa, baik itu dalam kegiatan musdes ataupun dalam realisasinya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tengkejau sangat terlibat dalam program pembangunan desa dan sangat berperan dalam keberhasilan program tersebut. Bapak Syaifullah, kepala desa, mengatakan bahwa masyarakat sangat tertarik untuk mendukung program-program yang tercantum dalam RKPDes. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasa memiliki tanggung jawab atas pembangunan desa. Bapak Milton Crosby, perwakilan BPD, menyatakan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam proses implementasi program pembangunan dan aktivitas musyawarah desa. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama dengan baik, yang memungkinkan program menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan warga.

#### 5. Tantangan dalam Kolaborasi

Kolaborasi menghadapi tantangan seperti koordinasi buruk akibat perbedaan tujuan, kurangnya komitmen dan kepemimpinan, kesenjangan pengetahuan, konflik nilai budaya, rendahnya kepercayaan, masalah teknologi, dan ketidakjelasan peran. Ada beberapa Solusi yang mencakup membangun struktur koordinasi yang jelas, memanfaatkan

platform komunikasi, memastikan dukungan pimpinan, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan, mengadopsi pendekatan inklusif, membangun kepercayaan melalui transparansi, memastikan akses teknologi merata, dan menetapkan peran serta tanggung jawab sejak awal. Dengan pendekatan ini, kolaborasi dapat berjalan lebih efektif, mengurangi hambatan, dan mencapai tujuan bersama secara efisien (Kasidi, K. 2020).

Dari hasil wawancara Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) mengidentifikasi beberapa tantangan:

“Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa salah satunya adalah keterbatasan keterbatasan SDM yang ada di Desa Tengkejau mempengaruhi dalam upaya menentukan upaya-upaya untuk menemukan potensi terkait dengan bagaimana Desa membangun.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Milton Crosby selaku BPD pada (19 November 2024):

“Tantangan saat ini yaitu tingkat ego masyarakat dan ketidakpedulian dalam membangun desa.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi Desa Tengkejau saat bekerja sama dalam pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas adalah salah satu kendala utama, kata Bapak Syaifullah, kepala desa. Kemampuan desa untuk menemukan dan memanfaatkan kekuatan lokal untuk mendukung pembangunan dipengaruhi oleh keterbatasan ini. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis dan pelaksanaan program pembangunan dapat terhambat oleh kapasitas SDM yang



rendah. Selain itu, Bapak Milton Crosbi, perwakilan BPD, menekankan dua tantangan sosial: tingkat kebanggaan masyarakat yang tinggi dan kurangnya perhatian terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada hambatan dalam membangun rasa kebersamaan dan kerja sama di antara warga, yang dapat menyebabkan kerja sama menjadi kurang efektif.

#### **B. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Desa**

Diharapkan masyarakat terlibat (berpartisipasi) dalam program pemerintah, terutama di tingkat desa. Partisipasi tidak langsung dan langsung Sulistiyani 2004 (dalam Ibrahim, I. 2021) menjelaskan bahwa klasifikasi partisipasi dibagi menjadi dua kategori: 1) Partisipasi langsung, yang terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan tertentu selama proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi ketika semua orang memiliki kemampuan untuk menyuarakan pendapat mereka, membahas topik masalah, atau menentang keputusan atau ucapan orang lain. 2) Partisipasi tidak langsung terjadi ketika seseorang menyerahkan hak partisipasinya kepada orang lain. Karena dalam pengembangan suatu desa dibutuhkan kerjasama dengan setiap lapisan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan peluang, partisipasi masyarakat yang aktif akan kembali berdampak pada kepentingan mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi di Desa Tengkejau dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

## 1. Program Pemberdayaan Tani

Program Pemberdayaan Tani adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani melalui berbagai kegiatan yang mendukung usaha tani mereka, seperti pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi antar petani. Fokus utama Program Pemberdayaan Tani adalah untuk memberi petani kemampuan untuk mengelola usaha tani mereka secara mandiri dan berkelanjutan, serta untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan (Agustina, T. 2020).

Dari hasil wawancara Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) menjelaskan tentang program pemberdayaan kelompok tani:

“Dampak program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah Desa ini adalah salah satunya adalah pemberdayaan kelompok tani karet di Desa Tengkejau di mana pada kegiatan program tersebut Pemerintah Desa menyiapkan strategi untuk mendatangkan alih-alih pertanian karet dimana pada kegiatan tersebut dilakukan penyuluhan terkait dengan upaya peningkatan produktivitas.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Maria Gidong selaku Kelompok Tani Tengkejau pada (21 November 2024):

“Kegiatan pemberdayaan dinilai sangat efektif dalam upaya peningkatan SDM masyarakat. Misalnya seperti pemberdayaan kelompok tani karet, sehingga kami sebagai masyarakat dapat meningkatkan kemampuan kami seputar pemahaman pertanian karet.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program Pemberdayaan

Tani di Desa Tengkejau berkonsentrasi pada pembangunan kelompok tani karet. Pemerintah desa telah merencanakan untuk mendatangkan spesialis pertanian karet untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani, kata Bapak Syaifullah, kepala desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas petani dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola usaha tani karet secara lebih efisien. Menurut Ibu Maria Gidong, seorang warga Desa Tengkejau, program pemberdayaan tani sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di desa, terutama dalam hal pemahaman dan penerapan teknik pertanian karet.

Partisipasi masyarakat dalam program ini menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dalam membangun program yang sesuai dengan kebutuhan petani dan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Metode yang digunakan dalam program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu petani tetapi juga membangun kolaborasi antar petani melalui pengembangan kelompok tani. Dengan demikian, program ini mendukung keberlanjutan usaha tanaman.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

Pemberdayaan Ekonomi Kreatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor kreatif. Konsep ini menekankan pentingnya kreativitas, inovasi, dan penggunaan pengetahuan sebagai sumber daya utama dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Pemberdayaan

ekonomi kreatif melibatkan upaya untuk memberdayakan individu dan komunitas agar dapat memanfaatkan kreativitas dan keterampilan mereka dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai. Ini mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan seni, desain, media, teknologi informasi, dan industri kreatif lainnya yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional (Habib, M. 2021).

Dari hasil wawancara Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024) menjelaskan tentang ekonomi kreatif:

“Desa Tengkejau sendiri memiliki komunitas kecil yang bergerak di bidang kesenian, salah satunya adalah sanggar Ulun Kenuau. Sanggar tersebut bergerak di bidang kesenian untuk mengupayakan program ekonomi kreatif dari kerajinan tangan. Misalnya penjualan alat musik tradisional secara online dan offline. Di tahun 2023, sanggar memperoleh pemasukan sebanyak Rp.11.000.000 dari hasil penjualan alat music tradisional.”

Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024):

“Pada bulan Juli yang lalu anak-anak tersebut sudah menjual sebanyak 32 alat musik tradisional dengan hasil yang fantastik... ada juga terkait dengan penampilan-penampilan yang memang anak-anak tersebut sering mengisi event-event tertentu sehingga ada fee yang mereka dapatkan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Pengembangan komunitas kesenian, seperti Sanggar Ulun Kenuau, adalah fokus dari upaya pemberdayaan ekonomi kreatif Desa Tengkejau. Menurut Erick Kantona, sekretaris desa, sanggar ini bergerak di bidang seni, terutama kerajinan tangan, dengan membuat dan menjual alat musik tradisional secara online dan offline. Sebagai bukti keberhasilan ekonomi

kreatif dalam meningkatkan pendapatan komunitas lokal, sanggar tersebut berhasil memperoleh pemasukan sebesar Rp11.000.000 dari penjualan alat musik tradisional pada tahun 2023. Hal ini diperkuat oleh Bapak Syaifullah, Kepala Desa, yang menyatakan bahwa pada bulan Juli, sanggar tersebut berhasil menjual 32 alat musik tradisional dengan keuntungan yang besar. Anak-anak dari sanggar juga sering tampil di berbagai acara dan mendapatkan uang untuk itu. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif tidak hanya meningkatkan nilai budaya lokal tetapi juga memberikan peluang ekonomi.

Program pemberdayaan ekonomi kreatif di Desa Tengkejau melalui sanggar kesenian menunjukkan potensi besar sektor kreatif untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Program ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya tradisional, dan menciptakan identitas desa yang unik di mata dunia dengan memanfaatkan kreativitas dan kearifan lokal.

### 3. Pemberdayaan Kelompok Perempuan

Tujuan pemberdayaan kelompok perempuan adalah untuk meningkatkan kemampuan, akses, dan kontrol perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Program ini berfokus pada peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengambilan keputusan dan pengembangan komunitas. Untuk mencapai tujuan, pemberdayaan kelompok perempuan harus mengatasi beberapa tantangan. Ini termasuk norma sosial yang menghalangi perempuan untuk

berpartisipasi, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan kelompok perempuan adalah tindakan strategis yang meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan selain memberikan manfaat langsung kepada individu (Sutoyo, R. I. 2021).

Dari hasil wawancara pernyataan Bapak Milton Crosby selaku BPD pada (19 November 2024) menjelaskan program pemberdayaan perempuan:

“Program pemberdayaan di bidang ekonomi salah satunya adalah kegiatan ibu PKK dalam upaya memberikan kegiatan untuk membudidayakan kaum perempuan dalam membuka UMKM di desa.”

Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Ibu Margareta Lusiana sebagai Pengurus Kelompok Perempuan Desa Tengkejau pada (15 November 2024):

“Yang saya ketahui, kegiatan yang paling rutin itu adalah pemberdayaan kelompok perempuan atau PKK dalam transformasi UMKM. Misalnya pemerintah desa bekerjasama dengan Lembaga LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk melakukan kegiatan budidaya bahan pangan hasil perkebunan dijadikan bahan produksi yang bernilai jual. Misalnya membuat kerupuk, snack, dan lain-lain.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Tujuan dari program pemberdayaan kelompok perempuan di Desa Tengkejau adalah untuk meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi melalui pengembangan dan pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dimaksudkan untuk memberi kaum perempuan di desa peluang usaha melalui kegiatan ibu-ibu PKK, kata perwakilan BPD Bapak Milton Crosby. Ini diperkuat oleh pengurus kelompok perempuan desa, Ibu

Margareta Lusiana, yang mengatakan bahwa transformasi UMKM memungkinkan penggunaan hasil perkebunan untuk membuat produk bernilai jual. Pemerintah desa bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam program ini untuk melatih perempuan dalam mengolah makanan menjadi snack dan kerupuk. Selain menghasilkan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru, kegiatan ini meningkatkan keterampilan dan kemandirian perempuan di desa.

Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan melibatkan berbagai lembaga, program pemberdayaan ini menunjukkan bahwa upaya strategis yang melibatkan perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal dapat membawa dampak positif, baik secara individual maupun kolektif. Program ini membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas mereka.

#### 4. Tingkat Partisipasi Dalam Program Pemberdayaan

Dalam program pemberdayaan masyarakat, tingkat partisipasi merujuk pada sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program tersebut. Tingkat partisipasi dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator yang menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proses program, dari perencanaan hingga evaluasi (Arifai, M., 2022).

Dari hasil wawancara Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024) menjelaskan tentang tingkat partisipasi:

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa, sangat antusias, namun tidak lepas juga dalam penerimaan program tersebut, kelemahan masyarakat hanya tertuju pada tingkat mutu SDM individunya setiap masyarakat dalam menjalin Kerjasama.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Milton Crosby selaku BPD pada (19 November 2024):

“Sangat baik, mengingat sampai saat ini masyarakat masih ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan desa, baik itu dalam kegiatan musdes ataupun dalam realisasinya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Tengkejau sangat terlibat dalam program pemberdayaan. Bapak Erick Kantona, sekretaris desa, menyatakan bahwa masyarakat sangat terlibat dalam pelaksanaan program-program desa. Namun, ia juga menekankan kelemahan sumber daya manusia individu, yang kadang-kadang menghalangi kerja sama yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun partisipasi masyarakat yang tinggi, kualitas partisipasi harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Bapak Milton Crosbi, perwakilan BPD, mendukung gagasan tersebut dengan menyatakan bahwa masyarakat terus terlibat dalam kegiatan pembangunan desa, termasuk pelaksanaan program-programnya dan musyawarah desa. Adanya kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pembangunan komunitas mereka ditunjukkan oleh partisipasi aktif ini.

Keberhasilan pemerintah desa dalam menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka



ditunjukkan oleh tingkat partisipasi yang tinggi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, masyarakat harus dikembangkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara kuantitatif tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar.

#### 5. Dampak Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan masyarakat memiliki efek positif secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, program ini meningkatkan pendapatan melalui pelatihan keterampilan dan akses modal, mendorong kemandirian, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi yang mendukung kesejahteraan keluarga. Secara sosial, program ini meningkatkan kualitas hidup melalui akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kepercayaan diri, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat. Namun, masalah seperti kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta keengganan masyarakat terhadap perubahan sering menghambat program. Program sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak. Pemberdayaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan individu dan komunitas jika dilakukan dengan cara yang direncanakan (Baharuddin, I., 2021).

Dari hasil wawancara Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024) menjelaskan dampak program pemberdayaan:

“Dampak pemberdayaan masyarakat dalam program2 tertentu, selalu memberikan impek besar bagi peningkatan mutu ekonomi keluarga. Salah satunya program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kapasitas kelompok tani. Pada program tersebut, masyarakat diberikan ilmu baru seputar Bertani dan bagaimana memproduksi secara cepat hasil panen nya. Dan itu menambah daya tambahan untuk pemasukan bulanan petani.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Milton Crosby selaku BPD pada (19 November 2024):

“Dampak pemberdayaan bagi masyarakat pastinya sangat besar, mengingat kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru. Misalnya seperti pemberdayaan kelompok tani baru-baru ini, memang memberikan impek besar bagi peningkatan kualitas SDM petani.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan manfaat program pemberdayaan masyarakat di Desa Tengkejau dari segi ekonomi dan sosial. Bapak Erick Kantona, Sekretaris Desa, menyatakan bahwa peningkatan kualitas ekonomi keluarga merupakan efek yang signifikan. Ini terutama berlaku untuk program pemberdayaan kelompok tani. Program ini mengajarkan orang-orang tentang cara menanam yang lebih baik dan meningkatkan hasil panen dengan cepat. Peningkatan pendapatan bulanan petani adalah hasil langsung dari program ini, yang membantu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Bapak Milton Crosby, perwakilan BPD, menegaskan bahwa program pemberdayaan meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat selain menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebagai contoh, evaluasi baru-baru ini

menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani, memberi mereka kemampuan untuk mengelola usaha tani secara produktif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan desa ini memiliki dampak besar pada masyarakat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun kualitas SDM. Namun, untuk program ini dapat bertumbuh, diperlukan dukungan yang konsisten dari berbagai pihak dan penguatan kapasitas masyarakat.

### **C. Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya pada Pembangunan Fisik dan Sosial**

Pengelolaan dana desa sangat mempengaruhi kemajuan fisik dan sosial di tingkat desa. Dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, membuka peluang lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, beberapa tantangan seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan rendahnya akuntabilitas masyarakat

Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya pada Pembangunan Fisik dan Sosial dalam program pemberdayaan ekonomi di Desa Tengkejau dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

#### **1. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebuah desa. Dana ini diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai berbagai program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan masyarakat, terungkap bahwa pengelolaan dana desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Musyawarah tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga masyarakat, guna menetapkan prioritas program pembangunan. Prinsip transparansi diwujudkan dengan mempublikasikan laporan realisasi anggaran melalui baliho dan papan pengumuman di desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) menjelaskan tentang Pengelolaan dana desa:

“Terkait dengan pengelolaan dana desa dirasakan sudah transparan atau terbuka kepada masyarakat yang sudah dianggap akuntabilitas karena memang saat ini Pemerintah Desa sudah meng-share itu terkait dengan laporan realisasi baik itu kepada BPD kepada perwakilan masyarakat dan juga kepada yang lain atau instansi terkait seperti Kecamatan dinas tpmd dan juga pendamping Desa ataupun koordinator Kecamatan yang dilakukan di dalam masalah Desa ataupun di dalam evaluasi penggunaan dana desa di tempat berjalan”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Erick Kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024):

“Menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa selalu menunjukan hasil perancangan APBDes dalam bentuk berita desa dan papan informasi desa baik berupa spanduk dan papan pengumuman desa, dalam menunjukan adopsi program dan anggaran yang digunakan”

Dan juga diperkuat oleh pertanyaan Bapak Albertus Abu selaku Masyarakat Desa Tengkejau pada (21 November 2024):

“Yang saya ketahui pemerintah desa mengalokasikan dana transfer berupa DD atau ADD itu selalu dirumuskan dalam RKPDes perencanaan, dan APBDes untuk patokan pengeluaran realisasi kegiatan. Alokasi tersebut sudah dibuat tersistematis sesuai kesepakatan melalui musyawarah desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Desa ini menggunakan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Menurut Kepala Desa, Bapak Syaifullah, dana desa digunakan untuk program infrastruktur seperti pembangunan jalan usaha tani yang dikelola secara swakelola dan melibatkan masyarakat langsung. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Menurut Sekretaris Desa Erick Kantona, pengelolaan dana desa menunjukkan struktur dan perencanaan yang baik dan didasarkan pada RKPDes dan APBDes, yang dipantau oleh instansi terkait. Sementara itu, Bapak Matius Aweng dari masyarakat Desa Tengkejau mengatakan bahwa dengan adanya musyawarah dan media informasi desa, transparansi cukup baik. Untuk memastikan bahwa dana desa didistribusikan secara merata antara warganya, aparatur desa,

mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan.

## 2. Dampak Pada Pembangunan Fisik

Penggunaan dana desa untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya telah dilakukan, yang meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat desa secara signifikan. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mempercepat transportasi dan distribusi hasil pertanian, tetapi juga mendorong pertumbuhan lingkungan (Erowati, 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) menjelaskan tentang dampak pada pembangunan fisik:

“Tentunya menjadi hal positif dalam upaya meningkatkan kualitas dari kualitas umum itu dan juga infrastruktur yang ada di desa karena tujuannya adalah untuk mempermudah akses masyarakat desa dalam melakukan hal-hal tertentu sebagai salah satu contoh untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tentunya salah satu dasar penunjang kegiatan itu adalah infrastruktur seperti pembangunan jalan usaha tani yang tadinya itu jalannya tanah kemudian dibangunlah jalan beton agar nanti transportasi pengangkut hasil produksi dapat digunakan”

Dan juga diperkuat oleh pertanyaan Bapak Albertus Abu selaku Masyarakat Desa Tengkejau pada (21 November 2024):

“Sangat berpengaruh, mengingat sekarang desa sudah bisa membangun infrastruktur sendiri tanpa menunggu aspirasi dari PEMDA atau dari Pemerintah Provinsi, desa sudah dapat mengupayakan pelaksanaan pembangunan secara mandiri dengan menggunakan dana desa”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pemberian dana desa telah memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan fisik desa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syaifullah, kepala desa, dan Bapak Albertus Abu, warga desa Tengkejau. Bapak Syaifullah menekankan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan usaha tani yang awalnya berupa jalan tanah sebelum diubah menjadi jalan beton adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mempermudah transportasi. Hal ini menunjukkan bagaimana keuangan desa digunakan dengan baik untuk membangun infrastruktur yang memfasilitasi usaha produktif masyarakat. Menurut Bapak Albertus Abu, kehadiran keuangan desa telah memungkinkan desa untuk melakukan pembangunan sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah federal, negara bagian, atau pemerintah daerah.

Hal ini menggambarkan betapa otonomnya masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan menetapkan tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat ketika desa mampu membangun infrastruktur mereka sendiri. Secara keseluruhan, keuangan desa telah memainkan peran penting dalam menumbuhkan kemandirian lokal dan meningkatkan standar infrastruktur. Namun, agar semua masyarakat dapat

memperoleh manfaat yang adil dari pertumbuhan, akuntabilitas dan keterbukaan harus ditegakkan.

### 3. Dampak Pada Pembangunan Sosial

Secara umum, pertumbuhan sosial di desa-desa sangat terbantu dengan adanya dana desa. Dana desa berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya melalui peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, penguatan masyarakat, dan akses yang lebih besar terhadap pelayanan dasar. Untuk menjamin agar manfaat dana desa dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, isu-isu seperti akuntabilitas dan transparansi masih harus diselesaikan (Tangkumahat, F. V, 2017).

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) menjelaskan tentang dampak pada pembangunan sosial:

“Dampak program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah Desa ini adalah salah satunya adalah pemberdayaan kelompok tani karet di Desa Tengkejau di mana pada kegiatan program tersebut Pemerintah Desa menyiapkan strategi untuk mendatangkan alih-alih pertanian karet di mana pada kegiatan tersebut dilakukan penyuluhan terkait dengan upaya peningkatan produktivitas terkait dengan hasil panen karet upaya pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan SDM masyarakat”



Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Erick Kantona S.PD selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024):

“Desa Tengkejau sendiri memiliki komunitas kecil yang bergerak di bidang kesenian, salah satunya adalah Sanggar Ulun Kenuau. Sanggar tersebut bergerak di bidang kesenian untuk mengupayakan program ekonomi kreatif dari kerajinan tangan. Misalnya penjualan alat musik tradisional secara online dan offline. Di tahun 2023, sanggar memperoleh pemasukan sebanyak Rp.11.000.000 dari hasil penjualan alat musik tradisional”

Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Ibu Margareta Lusiana sebagai Pengurus Kelompok Perempuan Desa Tengkejau pada (15 November 2024):

“Kegiatan PKK berhasil meningkatkan pendapatan keluarga. Kami fokus pada upaya mengembangkan potensi ekonomi kreatif, seperti membuat kerajinan tangan, mengolah produk pertanian, dan menciptakan peluang usaha baru”

Dan diperkuat oleh pernyataan Ibu Maria Gidong selaku Kelompok Tani Tengkejau pada (21 November 2024):

“Program yang direncanakan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Dukungan pemerintah desa dan semangat usaha masyarakat mendorong keberhasilan program ini”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Pembangunan sosial masyarakat Tengkejau telah dipengaruhi secara signifikan oleh cara pengelolaan dana masyarakat. Kepala Desa Tengkejau, Bapak Syaifullah, menyatakan bahwa inisiatif pemberdayaan ekonomi telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat, seperti meningkatkan produksi kelompok petani karet melalui penyuluhan. Dana desa mendukung ekonomi kreatif, termasuk penjualan alat musik tradisional oleh Sanggar Ulun Kenuau dan kerajinan tangan oleh PKK,

yang meningkatkan pendapatan keluarga, menurut Sekretaris Desa, Bapak Erick Kantona, dan Manajer Kelompok Perempuan, Ibu Margareta Lusiana. Ibu Maria Gidong dari Kelompok Tani membuktikan bahwa inisiatif-inisiatif ini telah meningkatkan standar hidup masyarakat. Hasilnya, dana desa telah efektif dalam menumbuhkan potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, meskipun keterbukaan dan keterlibatan aktif masih perlu ditingkatkan.

#### 4. Tantangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kesulitan-kesulitan tersebut menunjukkan betapa sulitnya mengelola dana desa, meskipun dana desa memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas manajerial, keterbukaan, dan pengawasan (Simbolon, G., 2022).

Dari hasil wawancara pernyataan Bapak Milton Crosby selaku BPD pada (19 November 2024) menjelaskan terkait tantangan dalam pengelolaan dana desa:

“Tantangan saat ini yaitu tingkat ego masyarakat dan ketidakpedulian dalam membangun desa”

Dan juga diperkuat oleh pertanyaan Bapak Albertus Abu selaku Masyarakat Desa Tengkejau pada (21 November 2024):

“Tantangan saat ini ya mengatasi tingkat kemiskinan di desa, dan bagaimana agar masyarakat mau terlibat penuh dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan pemerintah desa. Karena ego politik sebagian masyarakat juga menjadi tantangan pemerintah desa dalam menggarap strategi perencanaan program desa secara mandiri”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa menurut Bapak Albertus Abu, warga Desa Tengkejau, dan Bapak Milton Crosby, anggota BPD, ego politik, keserakahan, dan sikap apatis masyarakat merupakan hambatan utama dalam mengelola keuangan desa. Meskipun keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program desa, hal ini menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, tingginya persentase kemiskinan juga menjadi kendala yang signifikan karena membatasi kapasitas masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah desa harus mempromosikan sosialisasi, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan mengembangkan inisiatif inklusif yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Untuk mendorong keberhasilan program desa dan mengurangi ego politik, transparansi dan komunikasi yang baik juga penting.

#### **D. Evaluasi Pengaruh Prakarsa pemerintah dan warga terhadap penurunan tingkat kemiskinan**

Evaluasi dampak inisiatif pemerintah dan partisipasi warga terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan beberapa kemajuan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal koordinasi, kualitas pelaksanaan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem (Nuraida, N., 2019)

Evaluasi Pengaruh Prakarsa pemerintah dan warga terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Desa Tengkejau dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

##### **1. Program Pemerintah dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan**

Berbagai program untuk mengurangi kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan pokok, dan memberikan dukungan kepada usaha kecil. Strategi Pentahelix dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) mendorong kemandirian ekonomi melalui modal usaha dan kolaborasi multi-pihak. Metode regionalisasi bantuan sosial memastikan bahwa bantuan disalurkan lebih tepat sasaran. Upaya terintegrasi dan kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara signifikan, meskipun masih ada tantangan (Sukmana, O., 2025)

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) menjelaskan tentang Program Pemerintah dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Desa Tengkejau:

“Dampak program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah Desa ini adalah salah satunya adalah pemberdayaan kelompok tani karet di desa Tengkejau, di mana pada kegiatan program tersebut Pemerintah Desa menyiapkan strategi untuk mendatangkan alih-alih pertanian karet. Pada kegiatan tersebut dilakukan penyuluhan terkait dengan upaya peningkatan produktivitas hasil panen karet. Upaya pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan SDM masyarakat”

Hal diperkuat juga dikemukakan oleh pernyataan Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024):

“Dampak pemberdayaan masyarakat dalam program-program tertentu selalu memberikan impek besar bagi peningkatan mutu ekonomi keluarga. Salah satunya program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kapasitas kelompok tani. Pada program tersebut, masyarakat diberikan ilmu baru seputar bertani dan bagaimana memproduksi secara cepat hasil panennya, dan itu menambah daya tambahan untuk pemasukan bulanan petani”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Milton Crosby selaku BPD pada (19 November 2024):

“Program pemberdayaan di bidang ekonomi salah satunya adalah kegiatan ibu PKK dalam upaya memberikan kegiatan untuk membudidayakan kaum perempuan dalam membuka UMKM di desa. Hal itu juga sangat berpengaruh”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa hasil dari pernyataan yang dibuat oleh Bapak Syaifullah, Bapak Erick Kantona, dan Bapak Milton Crosby, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi di Desa Tengkejau telah memiliki efek positif dalam mengurangi

tingkat kemiskinan. Bapak Syaifullah mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat telah ditingkatkan oleh program pemberdayaan kelompok tani karet melalui penyuluhan dan peningkatan produktivitas. Bapak Erick Kantona menambahkan bahwa program pemberdayaan kelompok tani tidak hanya memberikan pengetahuan baru tentang pertanian, tetapi juga meningkatkan pendapatan bulanan petani. Bapak Milton Crosby, di sisi lain, menekankan peran ibu-ibu PKK dalam mendirikan UMKM, yang memberdayakan perempuan dan membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Secara keseluruhan, program-program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan peluang usaha dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Desa Tengkejau

## 2. Peran Warga dalam Mendukung Prakarsa Pemerintahan

Sangat penting bagi warga untuk mendukung program pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Partisipasi aktif dalam program seperti PKH dan bantuan sosial, bersama dengan keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, memastikan bahwa program lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, orang-orang memiliki kemampuan untuk membangun jaringan komunitas untuk berbicara dan mencari solusi, serta untuk menyebarkan informasi melalui pendidikan dan penyuluhan. Selain itu, upaya ekonomi lokal seperti usaha mikro dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan pendapatan dan

menciptakan lapangan kerja. Pengentasan kemiskinan dapat lebih berhasil dan berkelanjutan jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama secara aktif (Puay, R., 2025).

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Syaifullah sebagai Kepala Desa pada (15 November 2024) menjelaskan tentang Peran Warga dalam Mendukung Prakarsa Pemerintahan di Desa Tengkejau:

“Agar dapat berjalan dengan lancar tentunya harus ada partisipasi langsung dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketika program-program itu dilaksanakan seperti yang satu contoh program bimtek terkait dengan peningkatan kapasitas kelompok tani, maka kelompok-kelompok petani itu juga harus menghadiri kegiatan tersebut. Artinya partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam kesuksesan terkait dengan program-program itu”

Hal diperkuat juga dikemukakan oleh pernyataan Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024):

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa sangat antusias, namun tidak lepas juga dalam penerimaan program tersebut, kelemahan masyarakat hanya tertuju pada tingkat mutu SDM individunya setiap masyarakat dalam menjalin kerja sama. Misalnya dalam realisasi program pemberdayaan kelompok tani, terkadang antusias masyarakat petani menurun diakibatkan kesulitan tingkat pemahaman dalam merealisasi program tersebut”

Dan juga diperkuat oleh pertanyaan Bapak Albertus Abu selaku Masyarakat Desa Tengkejau pada (21 November 2024):

“Sangat baik, hal itu dapat dilihat dari kegiatan yang sifatnya selalu dilaksanakan secara swakelola dengan kerja sama antar masyarakat, membuktikan bahwa relasi antar lembaga sangat baik”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa menurut pernyataan Bapak Syaifullah, Bapak Erick Kantona, dan Bapak Albertus Abu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

mendukung program-program pemerintah di Desa Tengkejau sangat penting untuk keberhasilan program tersebut. Bapak Syaifullah menekankan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung, seperti menghadiri kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani, merupakan kunci keberhasilan program. Namun, Bapak Erick Kantona menyoroti bahwa antusiasme masyarakat terkadang menurun karena terbatasnya pemahaman dan kualitas sumber daya manusia, yang menghambat realisasi program. Di sisi lain, Bapak Albertus Abu juga mengapresiasi kerja sama swakelola dan hubungan yang baik antar lembaga yang menunjukkan kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan program. Secara keseluruhan, partisipasi aktif masyarakat sangat penting, namun perlu didorong dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan agar program dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan

### 3. Tantangan dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan

Untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, ada banyak tantangan yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi, dominasi sektor ekonomi yang bernilai tambah rendah, dampak perubahan iklim, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Selain itu, ketidakpastian di seluruh dunia, anggaran yang terbatas, kebijakan yang tidak berfungsi dengan baik, dan masalah lain menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan berbagai cabang yang melibatkan kerja sama antara sektor swasta,



masyarakat, dan pemerintah. Untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, kebijakan yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial sangat penting (Sukmana, O., 2025).

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Erick kantona S.Pd selaku Sekretaris Desa pada (17 November 2024) menjelaskan tentang Tantangan dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan di Desa Tengkejau:

“Tantangan saat ini yaitu tingkat ego masyarakat dan ketidakpedulian dalam membangun desa”

Hal diperkuat juga dikemukakan oleh pertanyaan Bapak Albertus Abu selaku Masyarakat Desa Tengkejau pada (21 November 2024):

“Tantangan saat ini ya mengatasi tingkat kemiskinan di desa, dan bagaimana agar masyarakat mau terlibat penuh dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan pemerintah desa. Karena ego politik sebagian masyarakat juga menjadi tantangan pemerintah desa dalam menggarap strategi perencanaan program desa secara mandiri”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Maria Gidong selaku Kelompok Tani Tengkejau pada (21 November 2024):

“Faktor-faktor seperti perspektif yang berbeda, ketersediaan sumber daya yang terbatas, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat merupakan tantangan utama dalam menjalin kerja sama. Namun, semangat kolektif dan komitmen bersama membantu mengatasi tantangan ini”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Menurut Bapak Erick Kantona, Bapak Albertus Abu, dan Ibu Maria Gidong, egoisme pribadi, ketidakpedulian masyarakat, dan ego politik yang menghalangi partisipasi aktif dalam pembangunan desa adalah masalah utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Desa Tengkejau. Selain

itu, kendala lain dalam bekerja sama termasuk perbedaan pendapat, jumlah sumber daya yang terbatas, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok. Namun, dianggap penting untuk mengatasi tantangan ini adalah semangat kolektif dan komitmen. Untuk itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa, diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif

#### 4. Dampak Program terhadap Tingkat Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat telah meningkat sebagai hasil dari program Desa Tengkejau. Infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas kesehatan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup orang. Bantuan sosial, seperti PKH, juga membantu keluarga miskin mengurangi beban ekonomi. Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Program pendidikan meningkatkan partisipasi sekolah dan keterampilan masyarakat, dan program ketahanan pangan memperkuat kemandirian pangan lokal. Upaya kolaboratif telah menghasilkan kemajuan besar dalam kesejahteraan desa, meskipun tantangan seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim masih ada.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Ibu Maria Gidong selaku Kelompok Tani Tengkejau pada (21 November 2024) menjelaskan tentang Dampak Program terhadap Tingkat Kesejahteraan di Desa Tengkejau:

“Program yang direncanakan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Dukungan pemerintah desa dan semangat usaha masyarakat mendorong keberhasilan program ini”

Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Ibu Margareta Lusiana sebagai Pengurus Kelompok Perempuan Desa Tengkejau pada (15 November 2024):

“Kesejahteraan warga sangat dipengaruhi oleh program pemberdayaan ekonomi. Kegiatan PKK berhasil meningkatkan pendapatan keluarga. Kami fokus pada upaya mengembangkan potensi ekonomi kreatif, seperti membuat kerajinan tangan, mengolah produk pertanian, dan menciptakan peluang usaha baru”

Dan juga diperkuat dari pernyataan dari Bapak Andreas Abas selaku Pemuka Adat Desa pada (02 Desember 2024):

“Dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerintah desa telah melaksanakan berbagai kebijakan, seperti program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kelompok ekonomi produktif”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dari pernyataan Ibu Maria Gidong, Ibu Margareta Lusiana, dan Bapak Andreas Abas, program-program yang dilaksanakan di Desa Tengkejau telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ibu Maria Gidong menekankan bahwa program-program tersebut telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, didukung oleh kolaborasi antara pemerintah desa dan semangat usaha masyarakat. Ibu Margareta Lusiana menyoroti peran pemberdayaan ekonomi, khususnya

melalui kegiatan PKK, yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan dan pengolahan hasil pertanian. Hal ini tidak hanya menciptakan peluang usaha baru tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga. Sementara itu, Bapak Andreas Abas menekankan bahwa kebijakan pemerintah desa, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kelompok-kelompok ekonomi produktif, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, program-program ini menunjukkan bahwa pendekatan yang kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Desa Tengkejau.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Governing di Desa Tengkejau Kabupaten Melawi Kalimantan Barat)”, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antara warga dan pemerintah Desa Tengkejau dalam upaya mengatasi kemiskinan terwujud melalui beberapa mekanisme utama. Forum musyawarah desa menjadi wadah penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, lembaga, dan pemerintah desa untuk menyepakati program-program pembangunan. Sistem perencanaan partisipatif yang diterapkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah RKPDes. Dalam implementasinya, Desa Tengkejau mengadopsi program berbasis swakelola yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pelaksana program, seperti dalam pembangunan jalan usaha tani. Namun kolaborasi ini menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM yang mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi potensi desa, serta tingkat ego dan ketidakpedulian sebagian masyarakat dalam proses pembangunan. Meskipun terdapat tantangan, model kolaborasi yang dibangun telah menciptakan sistem pembangunan yang inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat.

Keberhasilan ini ditunjukkan melalui tingginya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan program-program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat yang diidentifikasi melalui proses musyawarah dan perencanaan partisipatif.

2. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi di Desa Tengkejau terwujud dalam beberapa program utama yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Program pemberdayaan tani menjadi salah satu inisiatif penting di mana kelompok tani karet mendapat pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas. Program ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas SDM petani yang tercermin dari peningkatan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengelola pertanian karet. Dalam sektor ekonomi kreatif, Sanggar Ulun Kenuau menjadi contoh keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kesenian tradisional. Sanggar ini telah berhasil menghasilkan pendapatan Rp.11.000.000 pada tahun 2023 dari penjualan alat musik tradisional, dengan pencapaian penjualan 32 alat musik dalam satu bulan. Selain itu, kelompok ini juga mendapatkan penghasilan tambahan dari pertunjukan di berbagai acara. Program pemberdayaan kelompok perempuan melalui PKK dan kerjasama dengan LPMD telah membuka peluang bagi kaum perempuan untuk mengembangkan UMKM. Fokus program ini adalah pengelolaan hasil perkebunan menjadi produk

bernilai jual seperti kerupuk dan makanan ringan yang memberikan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemberdayaan ini menunjukkan antusiasme yang tinggi, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kualitas SDM individual. Dampak program pemberdayaan ini terlihat jelas dalam peningkatan mutu ekonomi keluarga, terutama melalui peningkatan kapasitas kelompok tani yang menghasilkan tambahan pemasukan perbulan. Keberhasilan program-program ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat, didukung oleh fasilitasi pemerintah desa yang tepat dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa. Meskipun demikian, keberlanjutan program-program ini masih membutuhkan dukungan konsisten dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pengelolaan dana desa di Desa Tengkejau telah menunjukkan implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik. Pemerintah desa secara rutin mempublikasikan laporan realisasi anggaran melalui berbagai media seperti baliho dan papan pengumuman desa. Proses pengelolaan dana melibatkan mekanisme musyawarah desa yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPD dan masyarakat dalam penetapan prioritas pembangunan. perencanaan anggaran dilakukan secara sistematis melalui RKPDes dan APBDes dengan pengawasan dari berbagai instansi terkait. Dalam aspek pembangunan fisik, dana desa telah memberikan dampak signifikan

terutama melalui pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan usaha tani yang ditingkatkan dari jalan tanah menjadi jalan beton. Pembangunan ini telah mempermudah akses transportasi dan distribusi hasil produksi masyarakat yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi desa. Kemandirian desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah daerah atau provinsi menunjukkan efektivitas penggunaan dana desa. Pada aspek pembangunan sosial, dana desa telah mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas SDM dan pendapatan warga. Meskipun demikian, pengelolaan dana desa masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan ego politik masyarakat dan ketidakpedulian sebagian warga dalam pembangunan desa. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

4. Evaluasi melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, program pemerintah desa telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pemberdayaan kelompok tani karet, program PKK untuk mengembangkan UMKM, dan berbagai pelatihan keterampilan adalah beberapa program utama yang berkontribusi terhadap hal ini. Penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelompok tani telah berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan bulanan petani, khususnya dalam sektor pertanian. Partisipasi warga dalam mendukung inisiatif pemerintah memiliki berbagai hasil. Dalam pelaksanaan program swakelola, terlihat



antusiasme dan kerja sama yang baik. Namun, masih ada hambatan seperti kurangnya pemahaman dan kualitas SDM, yang kadang-kadang menghambat keberhasilan program. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM harus ditingkatkan dengan lebih intensif. Dalam upaya penurunan kemiskinan di Desa Tengkajau, beberapa tantangan utama adalah egoisme pribadi, ketidakpedulian sebagian orang dalam masyarakat, dan ego politik, yang menghambat partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, masalah yang harus diatasi termasuk keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok. Pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan kelompok ekonomi produktif menunjukkan dampak positif program terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan kerajinan tangan dan pengolahan produk pertanian, program PKK telah berhasil meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak peluang bisnis baru diciptakan melalui pendampingan kelompok ekonomi produktif dan bantuan modal usaha. Secara keseluruhan, upaya pemerintah dan partisipasi warga telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Tengkajau, meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat, pendekatan kolaboratif pemerintah desa dan masyarakat mendukung keberhasilan ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada Desa Tengkejau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dalam “Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan” adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tengkejau perlu mengembangkan program pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Program ini sebaiknya mencakup pelatihan manajerial, keterampilan teknis, dan pemahaman tentang pengembangan usaha, sehingga masyarakat dapat lebih optimal dalam mengelola dan mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang ada.
2. Pemerintah Desa Tengkejau perlu membentuk sistem mediasi konflik yang efektif mengingat adanya tantangan berupa ego politik dan ketidakpedulian sebagian masyarakat. Sistem ini dapat berupa forum khusus atau tim mediasi yang bertugas menjembatani perbedaan kepentingan dan mendorong partisipasi lebih aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam program pembangunan desa.
3. Pemerintah Desa Tengkejau perlu mengembangkan ekonomi kreatif melihat keberhasilan Sanggar Ulun Kenuau dan program PKK, pemerintah desa perlu memperluas program ekonomi kreatif dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi kreatif lainnya di Desa Tengkejau.

4. Pemerintah Desa Tengkejau perlu mengembangkan lagi sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur untuk mengukur efektivitas program-program pengentasan kemiskinan. Sistem ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan mencakup indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan program, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian program secara berkelanjutan.
5. Pemerintah Desa Tengkejau perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten, sektor swasta, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Penguatan kolaborasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi regular dan pengembangan kemitraan yang dapat memberikan dukungan tambahan bagi upaya pengentasan kemiskinan di Desa Tengkejau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sopian, S. H., & Pelembang, M. B. D. K. (2018), *SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH*.
- Alexander Buditjahjono Gedeona. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. 1(3), 1–203.
- Arifai, M., & Mattarima, M. (2022). ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 5(1), 55-70.
- Ayatullah, A. Q., Haif, A., Haq, F. M., Nurhaerat, N., Zulfikar, Z., Sulkifli, S., ... & Bahar, E. W. (2024). *Challenges and Solutions to Local Culture of South Sulawesi in the Era of Globalization. Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture*, 1(1).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2023. 50, 1–16. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada Maret,yang sebesar 7%2C53 persen>.
- Baharuddin, I., & Kamis, Y. (2021). Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial Di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 15-24.
- Denzin, K. Norman., & Lincoln, S. Yvonna. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5 th ed). California: SAGE Publication.
- Diyanto, C., Putranti, I. R., Yuwono, T., & Yuniningsih, T. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi Dan Komersialisasi. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i1.7574>
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Erowati, D., & Sos, S. (2021). Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *scopindo media pustaka*.

- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Handayani, S., & Bisri, M. H. (2020). Membangun Desa Dengan Kearifan Lokal Di Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 23-37.
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 450.
- Ibrahim, I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., & Kamaluddin, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat. *In Prosiding Seminar Nasional Planoeearth* (Vol. 2, pp. 48-52).
- Indriani, C. (2021). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Irawan, R., Mersa, S., & Mulyono, J. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Dalam Pembangunan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 9(1), 43–50. <https://doi.org/10.23960/administratio.v9i1.63>
- Isbandi. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 27. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA \(05-24-13-09-02-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA (05-24-13-09-02-30).pdf)
- Kasidi, K. (2020). Tantangan Kewirausahaan di Era Ekonomi Digital. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 1(1), 17-23.
- Khoriri, S., Subekti, S., & Agustina, T. (2020). Pemberdayaan Petani Dalam Menerapkan Program System of Rice Intensification (Sri) Berbasis Kegiatan Kelompok. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 42(1), 77-92.
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>

- Lily Sri Ulina Peranginangin. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 18(1), 66–78. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6877>
- Mariana, D. (2015). Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 216-229.
- Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG), 2(1), 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>
- Nuraida, N., Rusli, B., Sintaningrum, S., & Rahmatunnisa, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Subang. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 38-47.
- Nurhayati, S., Zahrani, N. A., & Syahputra, R. (2023). Kearifan Lokal dalam Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21384-21389.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Makalah the 5th international Symposium of Antropologi Indonesia. Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia, 1–15.
- Puay, R., Helan, Y. G., & Lamataro, C. W. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 49-57.
- Putra, I Ketut Candra, I Wayan Suarjana, B. N. K. P. (2022). Jurnal Emas. Jurnal Emas, 3(September 2023), 227–236.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Safuridar, S. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(1), 37–55. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i1.674>

- Sagita, N. I. (2016). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung. *CosmoGov*, 2(2), 308. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10009>
- Simbolon, G., & Lewowerang, Y. R. (2022). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata). *Education For All*, 2(1), 71-86.
- Sitepu, A. (2007). Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis quenensis* Jacq). Coklat (*Theobroma cacao*) dan Karet (*Havea brasiliensis*) di Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat. Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Quenensis* Jacq). Coklat (*Theobroma Cacao*) Dan Karet (*Havea Brasiliensis*) Di Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/55640>
- STIT, M., Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. *Inovasi Pembangunan :Jurnal Kelitbangan*, 6(02), 179–190. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96>
- Suryawati, C. (2006). Studi Tentang Bentuk Kemiskinan Penduduk Di Desa. 1, 129–141.
- Sutoyo, R. I. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Program Kerajinan Bordir di Desa Karang Malang, Gebog Kabupaten Kudus. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(01), 61-69.
- Suyitno, S. (2018). Metode penelitian kualitatif: konsep, prinsip dan operasionalnya. Akademia Pustaka.
- Syahputra, M. Y. I., & Sukmana, O. (2025). Pengentasan Kemiskinan Melalui Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia: Tinjauan Sistematis. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 265-279.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V., & Mirah, A. D. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335-342.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18–32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>

## LAMPIRAN



Foto bersama Bapak Syaifullah selaku Kepala Desa di Desa Tengkejau



Foto bersama Bapak Milton Crosby selaku BPD Desa Tengkejau



Foto bersama Ibu PKK Desa Tengkejau





Foto bersama Kelompok Tani  
Desa Tengkejau



Foto bersama Bapak Albertus Abu  
selaku Masyarakat Desa Tengkejau



Foto bersama Bapak Andreas Abas  
selaku Pemuka Adat Desa Tengkejau

## **PEDOMAN WAWANCARA**


Nama :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan :  
Pendidikan :


### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara warga dan pemerintah desa dalam proses pembangunan di Desa Tengkejau?
2. Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antara warga dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan?
3. Seperti apa tantangan yang dihadapi dalam menjalin kerjasama antara warga dan pemerintah desa?
4. Bagaimana cara program atau kegiatan yang dilaksanakan antara warga dan pemerintah desa?
5. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program atau kegiatan yang dijalankan?
6. Bagaimana dampak program pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan warga?
7. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi dapat dilaksanakan dengan sukses?
8. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh komunitas untuk mendorong ekonomi kreatif atau usaha kecil?
9. Bagaimana cara Desa Tengkejau mengalokasikan dana?
10. Bagaimana pengaruh penggunaan dana desa terhadap fasilitas umum dan infrastruktur desa?
11. Bagaimana cara pengelolaan dana desa menjaga transparansi dan akuntabilitas?
12. Nilai-nilai kearifan lokal seperti apa yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tengkejau?

13. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
14. Menurut Anda, bagaimana peran kearifan lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di desa?
15. Bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal di era modern ini?
16. Kebijakan atau program seperti apa yang telah dilaksanakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Tengkejau?
17. Bagaimana dampak program-program tersebut terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?
18. Faktor-faktor seperti apa yang paling berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Desa Tengkejau?

## PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING

 **SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

 **SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989


Nomor : 023/PEM/J/IV/2024  
Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi


Kepada :  
Analius Giawa, S.IP., M.Si  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"  
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Tri Tonga  
No. Mahasiswa : 19520128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul : 5 April 2024  
Judul Proposal : Pemerintah Desa dalam Bergaining Pembangunan Desa di Dusun Tapang Ria, Desa Tengkejau, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat Tahun 2024.

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 April 2024  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rini Santaloisa



## **SURAT IZIN PENELITIAN**

Perihal : Penerbitan Surat Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Tonga  
NIM : 19520128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Prakarsa Warga Dan Pemerintah Desa Dalam  
Memberantas Kemiskinan  
Lokasi Penelitian : Desa Tengkejau Kabupaten Melawi Kalimantan  
Barat  
Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.IP., M.Si

Mengajukan permohonan untuk dibuatkan surat ijin penelitian Skripsi di Desa Tengkejau Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Adapun saya lampirkan proposal penelitian yang disetujui oleh dosen pembimbing. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Oktober 2024

Menyetujui  
Dosen Pembimbing

Peneliti

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Tri Tonga

Mengetahui,  
Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI  
KECAMATAN PINOH UTARA  
DESA TENGAJAU**

Alamat: Jl. Sinder Olok No 34, Dusun Tengkejau, Desa Tengkejau

Nomor : 423/14/PEM-TKJ/2024

Yth.

Hal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat

Lamp : -

Desa

di-

Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Nomor : 806/I/U/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal permohonan ijin Penelitian atas nama:

Nama : Tri Tonga

No Mhs : 19520128

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Prakarsa Warga dan Pemerintah Desa dalam memberantas Kemiskinan

Pada prinsipnya Pemerintah Desa Tengkejau menerima dengan baik terkait permohonan Penelitian *Skripsi/Tesis* tersebut, mengingat pentingnya penelitian dan pengembangan dalam implementasi kebijakan Desa terhadap masyarakat Desa, serta timbal balik yang kami peroleh dari hasil penelitian untuk kebutuhan pengembangan lebih lanjut. Namun ada hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yaitu terkait bagaimana mahasiswa tersebut dapat mentaati aturan yang sudah berlaku di dalam Pemerintah Desa dan selalu berpakaian rapi. Artinya ada data yang memang secara *regulatif* tidak dapat kami bagikan karena merupakan data *adaptive* yang sifatnya rahasia.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tengkejau, 23 Oktober 2024

Kepala Desa Tengkejau

